



RANCANGAN **RENJA**

DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK

2026



www.diskominfo.anambaskab.go.id



diskominfo@anambaskab.go.id



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	6
1.4 Sistematika Penulisan	7
BAB II	9
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024	9
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik dan Capaian Renstra Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik.....	9
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik.....	21
2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik	32
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah	41
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	54
BAB III	55
TUJUAN DAN SASARAN	55
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	55
3.1.1 Telaahan Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika.....	55
3.1.2 Badan Pusat Statistik.....	57
3.1.3 Lembaga Sandi Negara/Badan Siber dan Sandi Nasional.....	60
3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik.....	71
3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.....	74
BAB IV	92
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN.....	92
BAB V	102
PENUTUP	102

BAB I

PENDAHULUAN

Perencanaan Kinerja adalah aktivitas pengambilan keputusan di depan tentang tingkat capaian kinerja yang diinginkan. Perencanaan kinerja merupakan proses penting yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis dapat diikuti dan dimonitor pencapaiannya. Perencanaan kinerja merupakan salah satu komponen akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang semestinya dilakukan oleh instansi pemerintah agar lebih mudah untuk meningkatkan akuntabilitas kerjanya.

Penyusunan rencana kinerja meliputi penyusunan sasaran (uraian, indikator, dan target) yang ingin dicapai dalam tahun bersangkutan, serta program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan mendukung pencapaian tujuan dan sasaran. Sasaran yang dimaksud dalam rencana kinerja ini adalah sasaran sebagaimana dimuat dalam dokumen Rencana Strategis, selanjutnya diidentifikasi sasaran mana yang akan diwujudkan pada tahun bersangkutan beserta indikator dan rencana tingkat capaiannya (targetnya).

Selanjutnya rencana kinerja yang disusun menjadi dasar dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran (RKA). Setelah anggaran ditetapkan melalui mekanisme pembahasan antara Pemerintah Daerah dengan DPRD (menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran/DPA), maka instansi pemerintah membuat rencana operasional, dan selanjutnya membuat Perjanjian Kinerja (PK) dengan atasan langsungnya, di mana penetapan kinerja ini akan digunakan sebagai dasar dalam melakukan evaluasi kinerja. Pada akhir periode dilakukan pengukuran kinerja untuk selanjutnya dilaporkan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP).

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas adalah dokumen perencanaan tahunan

Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas, sebagai penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas mengacu kepada kebutuhan dan permasalahan Pembangunan Infrastruktur Telekomunikasi, Mengimplementasikan e-Government/Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Pengintegrasian Data di Seluruh OPD, Mewujudkan Satu Data di Kabupaten Kepulauan Anambas, Keamanan Informasi, Menyebarkan Informasi Dengan Memanfaatkan TIK, serta Mengelola Isu Publik melalui Monitoring Media sehingga dapat terwujudnya Pembangunan Infrastruktur Penunjang Layanan Telekomunikasi dan Digitalisasi Tata Kelola Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Anambas sesuai dengan potensi sumber daya yang tersedia.

Hal tersebut bertujuan dalam rangka mengakomodasikan pencapaian target dan sasaran yang tercantum di dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) dan menjaga kesinambungan pembangunan sebagaimana yang diarahkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Anambas dan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021 – 2026.

Adapun rancangan tema Pembangunan dan prioritas Pembangunan tahun 2026, adalah sebagai berikut :

“Peningkatan Kualitas Pelayanan Dasar dan Daya Saing Daerah melalui Pengembangan Pariwisata dan Perikanan yang Berbasis pada Potensi Lokal serta Pengembangan Sumber Daya Manusia yang Inovatif”.

Rancangan Prioritas Pembangunan :

- 1. Meningkatkan Kualitas Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan.**
- 2. Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Kesetaraan Gender serta Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur yang Merata.**
- 3. Meningkatkan Ketahanan Pangan dan Ekonomi Biru.**

4. Mempersiapkan Tenaga Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan dan Mengembangkan Ekonomi Kreatif.

5. Memperkuat Reformasi Birokrasi.

Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, Urusan Statistik, dan Urusan Persandian menjadi sektor Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas. Peran tersebut ditempuh melalui perumusan, pelaksanaan, pemantauan, monitoring dan pelaporan kebijakan dalam pengelolaan e-Government, pengelolaan informasi serta komunikasi publik, penyelenggaraan statistik sektoral, domain instansi penyelenggara negara, persandian dan penetapan pola hubungan komunikasi sandi.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan serta Perundang-undangan yang digunakan sebagai latar belakang penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Intruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

- Tahapan, Tata cara, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016 Nomor 52, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 53);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026;
22. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 58 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Kabupaten Kepulauan Anambas.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2026 adalah Menentukan arah kebijakan pembangunan dalam Urusan Komunikasi dan Informatika, Statistik serta Persandian di Tahun 2026 dan Mewujudkan rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan prioritas pembangunan daerah di bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2026 yang sinergis dalam rangka mencapai target RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021 – 2026.

Adapun tujuannya adalah sebagai berikut:

1. Memberikan landasan operasional bagi Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya;
2. Menjadi landasan penyusunan usulan APBD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2026 melalui penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026;
3. Menjadi alat untuk menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan yang sejalan dengan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Program Bupati/ Wakil Bupati sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Anambas;

4. Mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan pembangunan di bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian antar wilayah dan antar tingkat pemerintahan (Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota) serta mewujudkan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah dan nasional.

1.4 Sistematika Penulisan

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2026 ini mengacu kepada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dengan sistematika yang terdiri dari 5 (lima) bab sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Menguraikan tentang Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD, Analisis Kinerja Pelayanan PD, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD, Review terhadap Rancangan Awal PD, Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Menguraikan tentang Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan sasaran Renja SKPD, Program dan Kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Menguraikan tentang rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah sebagai program, kegiatan dan sub kegiatan yang berisi indikator, pagu indikatif dan pagu prakiraan maju tahun depan.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisikan catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian dalam rangka pelaksanaan kinerja, ketersediaan anggaran (sesuai/tidak sesuai kebutuhan), kaidah-kaidah pelaksanaan kinerja serta rencana tindak lanjut.



BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Tahun 2024 dan Capaian Renstra Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik

Keberhasilan yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas ditentukan dari hasil pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang disesuaikan dengan Rencana Kerja (Renja) tahun bersangkutan dan APBD Kabupaten Kepulauan Anambas. Adapun program dan kegiatan yang telah dilaksanakan atau yang telah direalisasikan sesuai dengan pagu anggaran yang ditetapkan pada APBD tahun 2024.

Rencana Strategi (Renstra) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas sudah terakomodir dirumuskan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas pada Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024. Sampai dengan Bulan Desember tahun 2024 realisasi fisik di setiap Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan rata-rata sudah mencapai 94,75% dengan realisasi keuangan 75,98%.

Capaian keberhasilan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas pada tabel dibawah ini :



Tabel 2.1
Capaian Persentase (%) Realisasi Fisik dan Keuangan
s.d 31 Desember 2024

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Persentase (%) Realisasi s.d 31 Desember 2024		Realisasi	Efisiensi
		Keuangan	Fisik		
1	2	3	4	5	6
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.317.455.512	85,32	86,19	5.390.345.554	927.109.958
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	45.956.600	56.09	98.55	25.775.500	20.181.100
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	43.237.100	53,42	97,11	23.096.000	20.141.100
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.719.500	98,53	100	2.679.500	40.000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.611.661.617	87,84	87,50	4.050.708.389	560.953.228
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.387.597.617	89,33	100	39.919.489.389	468.108.228
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	188.900.000	58,68	100	110.850.000	78.050.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.600.000	49,38	50	790.000	810.000
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	33.564.000	58,33	100	19.579.000	13.985.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	684.199.881	78,81	68,49	466.296.527	217.903.354
Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	-	-	-	-	-
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.111.623	99,12	100	5.066.834	44.789
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9.912.368	0	0	0	9.912.368
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	14.752.152	99,59	100	14.691.767	60.385
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	51.083.752	75,91	79,45	38.777.500	12.306.252
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	60.574.986	90,23	100,00	54.656.500	5.918.486
Fasilitas Kunjungan Tamu	20.250.000	0	0	0	20.250.000



Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	522.515.000	67,58	100	355.103.926	169.411.074
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	29.441.712	99,60	100	30.715.049	118.000
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.218.000	97,20	100	4.100.000	118.000
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	25.223.712	100	100	25.223.712	0
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	870.860.706	91,56	97,47	797.371.926	73.488.780
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	64.262.638	94,82	96,50	60.936.111	3.326.527
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	41.260.000	88,38	100	36.554.485	4.805.515
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	765.238.068	91,46	95,93	699.881.330	65.356.738
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	75.334.996	27,70	65,14	20.869.500	54.465.496
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	69.364.996	25,34	30,28	17.579.500	51.785.496
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.970.000	55,11	100	3.290.000	2.680.000
PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	4.097.751.864	49,39	72,21	2.023.952.106	2.073.799.758
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	4.097.751.864	49,39	72,21	2.023.952.106	2.073.799.758
Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	50.187.000	44,08	82,35	22.122.300	28.064.700
Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	280.013.542	37,59	88,15	105.244.500	174.769.042
Pelayanan Informasi Publik	70.950.000	55,77	81,95	39.566.100	31.383.900
Layanan Hubungan Media	3.648.526.922	50,62	90,64	1.846.755.506	1.801.771.416
Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	18.050.000	56,86	90,14	10.263.700	7.786.300
Pemyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	30.024.400	0	0	0	30.024.400
PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	3.377.078.356	90,24	97,17	3.047.368.850	329.709.506
Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	3.225.161.127	90,98	97,58	2.934.103.428	291.057.699



Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	138.848.000	99,99	99,99	138.833.000	15.000
Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	3.086.313.127	90,57	95,30	2.795.270.428	291.042.699
Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	151.917.229	74,56	96,76	113.265.422	38.651.807
Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	26.500.000	65,64	99,25	17.393.786	9.106.214
Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	101.697.229	79,10	98,82	80.442.636	21.254.593
Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	23.720.000	65,05	92,22	15.429.000	8.291.000
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK					
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	161.000.000	73,61	94,62	118.505.364	42.494.636
Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	161.000.000	73,61	94,62	118.505.364	42.494.636
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	75.000.000	77,73	96,98	58.295.700	16.704.300
Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	41.000.000	64,10	93,29	26.281.664	14.718.336
Membangun Metadata Statistik Sektoral	45.000.000	75,40	93,59	41.275.000	11.072.000
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN					
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	348.999.339	81,96	89,37	286.050.785	62.948.554
Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	244.999.834	80,12	84,06	192.296.500	48.703.334
Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	244.999.834	80,12	84,06	192.296.500	48.703.334
Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	103.999.905	86,30	94,67	89.754.285	14.245.220
Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	103.999.905	86,30	94,67	89.754.285	14.245.220

TOTAL	14.302.285.071	76,10	87.91	13.439.304.811	3.436.062.412
--------------	-----------------------	--------------	--------------	-----------------------	----------------------

2.1.1 Faktor-Faktor Penyebab Tidak Tercapainya, Terpenuhinya Atau Melebihi Target Kinerja Program / Kegiatan

Adapun faktor – faktor penyebab keberhasilan terkait pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang di jalankan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik pada Tahun 2025 dalam rangka mencapai target sasaran kinerja yang sudah ditetapkan, sebagaimana sebagai berikut :

1. Urusan Komunikasi dan Informatika
 - a. Adanya komitmen para pengambil kebijakan sampai kepada para pelaksana kegiatan sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan sesuai dengan target perencanaan dengan waktu yang ditetapkan;
 - b. Adanya kerjasama dan koordinasi yang intens antar pejabat PPID Utama dengan pejabat PPID Pembantu di Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas;
 - c. Kerjasama dan tanggung jawab atasan dalam memberikan pekerjaan sesuai dengan pembagian tugas yang telah ditentukan
 - d. Kemampuan manajemen dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan target yang telah direncanakan;
 - e. Koordinasi terkait ide atau permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan dengan metode yang efisien dan efektif;
 - f. Adanya tolak ukur sehingga adanya kontrol dalam setiap pelaksanaan kegiatan;
 - g. Melakukan evaluasi kegiatan secara rutin sehingga kendala yang dihadapi dapat terkontrol dengan baik;
 - h. Adanya rencana pelaksanaan kegiatan sehingga dapat melakukan monitoring kemajuan kegiatan;
 - i. Melakukan komunikasi yang baik dalam pelaksanaan kegiatan; dan
 - j. Komitmen semua pihak sehingga keberhasilan kegiatan dapat terpenuhi.

2. Urusan Statistik

- a. Komitmen Pemerintah daerah dalam penyelenggaraan urusan Statistik sektoral pada tahun 2025;
- b. Koordinasi yang baik antara Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik sebagai walidata dengan Badan Pusat Statistik Kabupaten sebagai pembina data;
- c. Tersedianya portal statistik Kabupaten Kepulauan Anambas;
- d. Tersedianya dokumen data statistik sektoral untuk Perencanaan Pembangunan Daerah; dan
- e. Tersusunnya metadata variabel kegiatan statistik sektoral dari perangkat daerah sebagai informasi dari data statistik sektoral.

3. Urusan Persandian

- a. Komitmen Pemerintah daerah dalam Penyelenggaraan Urusan Persandian pada tahun 2025;
- b. Koordinasi yang baik dari seluruh Perangkat Daerah dalam penerapan keamanan informasi persuratan;
- c. Ketersediaan infrastruktur Teknologi Informasi yang memadai; dan
- d. Serta kerjasama yang baik dengan pihak stakeholder Pemerintah Daerah Dan Pusat.

Adapun faktor – faktor penyebab tidak terpenuhinya terkait pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang di jalankan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik pada Tahun 2025 dalam rangka mencapai target sasaran kinerja yang sudah ditetapkan, sebagaimana sebagai berikut :

1. Urusan Komunikasi dan Informatika

- a. Adanya rasionalisasi anggaran;
- b. Masih banyak PPID Pembantu di Perangkat Daerah yang belum memberikan informasi pada publik; dan
- c. Masih kurangnya Sumber Daya Manusia untuk mengoperasikan website PPID.

2. Urusan Statistik
 - a. Kurang respon perangkat Daerah dalam mengumpulkan data statistik sektoral;
 - b. Belum tersediannya portal Satu Data Anambas;
 - c. Belum terselenggaraannya Satu Data Indonesia tingkat Kabupaten;
 - d. Kurang mengertinya akan pentingnya keamanan informasi;
 - e. Capaian kinerja masih belum sinkron dengan indicator kinerja berdasarkan KEPMENDAGRI 050-5889 tahun 2021; dan
 - f. Perlunya perbaikan terhadap capaian kinerja yang sesuai dengan program kegiatan.
3. Urusan Persandian
 - a. Masih banyak stakeholder yang menyepelekan pentingnya dokumen informasi yang berklarifikasi;
 - b. Kurang responnya pemerintah pusat terkait pengaduan kendala menggunakan aplikasi berklasifikasi;
 - c. Koordinasi masih dinilai lambat; dan
 - d. Masih ada infrastruktur yang belum tersedia.

2.1.2 Implikasi Yang Timbul Terhadap Target Capaian Program Rencana Kerja (RENSTRA) Perangkat Daerah

- a. Keterbukaan Informasi Publik menjadi bagian penting dan berimplikasi besar dalam upaya pencapaian target Program Renstra Diskominfo karena dari semua hal ada keterkaitannya, tentang bagaimana kita menginformasikan kepada publik mengenai kinerja, konteks perumusan, koordinasi dan sinkronisasi serta evaluasi kebijakan terkhusus di bidang Informasi dan Komunikasi Publik;

- b. Adapun implikasi terhadap capaian Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika terselenggara dengan baik. Walaupun ada beberapa kendala selama pelaksanaan kegiatan tahun 2025 baik dari keterbatasan anggaran, pengembangan akses telekomunikasi, peningkatan kualitas SDM IT dan perekrutan tenaga IT. Akan tetapi permasalahan tersebut dapat teratasi dengan baik sehingga kegiatan dapat dilaksanakan sesuai target yang telah direncanakan, yaitu menentukan kegiatan yang menjadi prioritas dan melakukan pelatihan secara daring serta melakukan rekrut SDM IT;
- c. Tersediannya data statistik sektoral yang dapat digunakan sebagai data dan informasi acuan untuk perencanaan pembangunan daerah;
- d. tersediannya data statistik sektoral yang dapat menjadi bahan evaluasi/pengukuran pembangunan daerah;
- e. meningkatnya data keamanan persandian daerah yang digunakan oleh organisasi perangkat daerah ditandai dengan mulai diterapkannya tanda tangan elektronik pada surat-menyurat;
- f. meningkatnya coverage area Radio Pancar Ulang (RPU) yang dapat digunakan untuk komunikasi antar daerah; dan
- g. Terpenuhinya penilaian Indeks Keamanan Informasi (IKAMI).

2.1.3 Kebijakan / Tindakan Perencanaan Dan Penganggaran Yang Perlu Diambil Untuk Mengatasi Faktor-Faktor Penyebab Tersebut

- a. Melakukan proses perencanaan dengan lebih seksama, antara lain dengan menggelar reviu setiap triwulan, terutama membahas serapan anggaran agar sesuai dengan tata kelola program, kegiatan dan sub kegiatan;

- b. Lebih aktif mengadakan koordinasi dengan stakeholders dan Organisasi Perangkat Daerah terkait pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan;
- c. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan penyelenggara telekomunikasi sehingga akses telekomunikasi di Kabupaten Kepulauan Anambas dapat terpenuhi;
- d. Mengikuti pelatihan teknis untuk meningkatkan kualitas SDM IT dengan anggaran yang terbatas sehingga dilakukan secara daring;
- e. Mengikuti seminar daring untuk meningkatkan pemahaman bidang IT;
- f. Melakukan rekrutmen tenaga ahli untuk membantu pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan layanan jaringan intra Pemerintah Daerah;
- g. Menyusun regulasi dan perencanaan urusan statistik sektoral dan persandian daerah berupa Peraturan Bupati dan penyusunan master plan kegiatan Statistik sektoral dan persandian Daerah;
- h. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan statistik sektoral dan urusan persandian di daerah untuk memastikan tercapainya target capaian urusan statistik sektoral dan persandian daerah;
- i. Meningkatkan sinergi antar instansi, koordinasi dan kolaborasi antar instansi untuk memastikan pelayanan yang baik bagi masyarakat dalam pemanfaatan data dan pengamanan informasi;
- j. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pengawasan urusan pemerintahan untuk memastikan tercapainya target program kegiatan; dan
- k. Meningkatkan pengembangan sumber daya manusia untuk memastikan terlaksananya program kegiatan urusan statistik sektoral dan persandian daerah.

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas menyadari bahwa masih ada kelemahan/kekurangan yang harus diperbaiki dan dilakukan untuk mencapai kinerja yang lebih baik. Untuk itu perlu dilakukan evaluasi terhadap apa yang telah dilaksanakan guna mengetahui penyebab kelemahan/kekurangan tersebut sebagai umpan balik (feed back) dari apa yang telah dan akan dilaksanakan untuk di masa yang akan datang.





Tabel 2.2

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik
dan Pencapaian Renstra Dinas Komunikasi dan Statistik s/d Tahun 2024
Kabupaten Kepulauan Anambas (LKJIP)

No	Sasaran	Indikator Sasaran	2024			Kategori	Sumber Data
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Tata Kelola Kinerja Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kab. Kep. Anambas yang Transparan dan Akuntabel	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kab. Kep. Anambas	(63.00) B	(69,06)B	109,61%	Sangat Baik	Evaluasi Inspektorat KKA
2	Meningkatnya Perluasan Layanan Telekomunikasi	Persentase Desa Yang Masih Blank Spot Terselesaikan	-	-	-	-	-
		Persentase Pemenuhan Aspek	62,50%	100%	160%	Sangat Baik	Penilaian Mandiri



3	Meningkatnya Penggunaan Sistem Informasi Daerah	SPBE					
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	(85.00) Menuju Informastif	(92,21) Informatif	108,5%	Sangat Baik	Evaluasi Komisi Informasi
4	Meningkatnya Pelayanan Data dan Statistik	Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang Memenuhi Standard Data Indonesia (SDI)	61,90%	100%	161,5%	Sangat Baik	Penilaian Mandiri
5	Meningkatnya Kinerja Sistem Persandian Daerah	Nilai Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	(240) Pemenuhan Kerangka Kerja Dasar	(286) Pemenuhan Kerangka Kerja Dasar	100%	Sangat Baik	Penilaian Mandiri
Rata-rata Capaian Strategis					109,80%	Sangat Baik	



2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik

Pengukuran kinerja pada Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan kegiatan, sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Instansi Pemerintah. Pengukuran kinerja merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak.

Pengukuran kinerja mencakup :

1. Kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing-masing indikator kinerja kegiatan;
2. Tingkat pencapaian sasaran yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan. Pengukuran tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan.

Analisis kinerja dimulai dengan pengukuran pencapaian keluaran dan hasil kinerja yang dituangkan dalam formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK). Pengukuran kinerja kegiatan dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja berupa keluaran dan hasil.

Hasil pengukuran capaian kinerja indikator kinerja ini selanjutnya dipergunakan untuk melakukan evaluasi kinerja masing-masing kegiatan. Setiap kegiatan dinilai tingkat pencapaian masing-masing indikator kinerjanya seperti disajikan pada tabel di bawah ini :



Tabel 2.3

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik
Kabupaten Kepulauan Anambas

Kode	Sub Kegiatan	Indikator	SPM/Stan dar Nasional	IK K	Target Renstra Diskominfo				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catat an Analisis
					Tahun 2023 (thn n-3)	Tahun 2024 (thn n-2)	Tahun 2025 (thn n-1)	Tahun 2026 (thn n)	Tahun 2023 (thn n-3)	Tahun 2024 (thn n-2)	Tahun 2025 (thn n-1)	Tahun 2026 (thn n)	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	
2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Dokumen Laporan Kinerja Dilaksanakan Tepat Waktu dan Hasil Pengendalian Evaluasi Sesuai Peraturan Perundang- undangan			100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	
2.16.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	-	4 Dokumen	4 Dokumen	
2.16.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	-	2 Dokumen	2 Dokumen	



2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2.16.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2.16.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	
2.16.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			1 Laporan	1 Dokumen	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	
2.16.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2.16.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Kepegawaian Yang			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	



		Dilaksanakan Tepat Waktu											
2.16.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			-	-	2 Paket	2 Paket	-	-	-	2 Paket	
2.16.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			-	100%	8 Orang	8 Orang	-	-	8 Orang	8 Orang	
2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Bahan Perkantoran, Kebutuhan Rapat, Aktivitas Lapangan, Pelayanan Tamu, serta Perjalanan Dinas			100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	
2.16.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				100%	1 Paket	1 Paket		-	1 Paket	1 Paket	
2.16.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				100%	1 Paket	2 Paket		-	1 Paket	2 Paket	



2.16.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			100%	1 Paket	3 Paket		-	1 Paket	3 Paket	
2.16.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			100%	1 Paket	4 Paket		-	1 Paket	4 Paket	
2.16.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			100%	1 Paket	2 Paket		-	1 Paket	2 Paket	
2.16.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu			100%	1 Laporan	1 Laporan		-	1 Laporan	1 Laporan	
2.16.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			100%	77 Kali	1 Laporan		-	1 Laporan	1 Laporan	
2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah			100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%
2.16.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan		-	4 Unit	4 Unit	4 Unit	-	-	1 Unit	4 Unit	
2.16.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		-	100%	9 Unit	4 Unit	-	-	9 Unit	4 Unit	



2.16.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	-	1 Unit	1 Unit	
2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Administrasi Perkantoran dan Langganan Lainnya			100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	
2.16.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				100%	1 Laporan	1 Laporan	0%	-	1 Laporan	1 Laporan	
2.16.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				100%	1 Laporan	1 Laporan	0%	-	1 Laporan	1 Laporan	
2.16.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				100%	1 Laporan	1 Laporan	0%	-	1 Laporan	1 Laporan	
2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Berkondisi Baik			100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	
2.16.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				100%	6 Unit	16 Unit	0%	-	6 Unit	16 Unit	
					-				-	-			



2.16.02	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Keterbukaan Informasi Publik			100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	
2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Informasi yang Terpublikasi			100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	
2.16.02.2.01.02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik			50 Laporan	50 Laporan	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	
2.16.02.2.01.04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik			350 Berita	400 Berita	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	
2.16.02.2.01.06	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik			80 Informasi	85 Informasi	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	
2.16.02.2.01.07	Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media			1 Layanan	7200 Berita	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	-	1 Layanan	1 Layanan	
2.16.02.2.01.10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya			-	-	3 Orang		-	-	3 Orang	3 Orang	
2.16.02.2.01.13	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung			-	3 unit	2 Unit		-	-	3 Unit	2 Unit	



	Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota											
2.16.03	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Layanan SPBE Pemerintah Daerah Yang diterapkan Oleh Perangkat Daerah			85,71%	92,86%	100%	100%	-	-	92,86%	100%	
2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah Kab. Kep. Anambas			100%	100%	100%	100%		-	100%	100%	
2.16.03.2.01.02	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	
2.16.03.2.01.03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah			30 Unit	93,33%	30 Unit	30 Unit	30 Unit	-	30 Unit	30 Unit	



2.16.03.2.02	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Sistem Informasi/ Aplikasi Perkantoran Elektronik yang tersedia disetiap Perangkat Daerah			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		-	100%	100%	
2.16.03.2.02.02	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik			1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	
2.16.03.2.02.03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola			1 Unit	100%	1 Unit	1 Unit	1 Unit	-	1 Unit	1 Unit	
2.16.03.2.02.07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan			1 Unit	70,00%	1 Unit	1 Unit	1 Unit	-	1 Unit	1 Unit	
2.16.03.2.02.09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City			1 Dokumen	98,15%	100%	-	1 Dokumen	-	98,15%	100%	



2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Laju Pemanfaatan Data Sektoral			100%	100%	100%	100%		-	100%	100%	
2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Dokumen Ketersediaan Data Sektoral Untuk Perencanaan Pembangunan Daerah			45,45%	63,64%	81,82%	100%		-	81,82%	100%	
2.20.02.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral			1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	
2.20.02.2.01.02	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Rangka Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi			6 Orang	5 Orang	5 Orang	5 Orang	-	-	5 Orang	5 Orang	
2.20.02.2.01.03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun			1 Dokumen	60,00%	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Pelaksanaan Keamanan Digital Perangkat Daerah			16,13%	19,35%	22,58%	29,03%		-	19,35%	22,58%	



2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan Pengamanan Dokumen Elektronik			16,13%	19,35%	22,58%	29,03%		-	19,35%	22,58%	
2.21.02.2.01.03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Berbasik Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik		1 Laporan	19,35%	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	-	1 Laporan	1 Laporan	
2.21.02.2.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penggunaan Radio HT dan Radio RIG			50,00%	53,70%	59,26%	62,96%		-	59,26%	62,96%	
2.21.02.2.02.01	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi		1 OPD	53,70%	1 Perangkat Daerah	1 Perangkat Daerah	1 OPD	1 OPD	-	1 Perangkat Daerah	1 Perangkat Daerah	



Analisis yang dilakukan oleh terkait Urusan Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian pada Tahun 2025 sesuai dengan Indikator Kinerja Kunci sebagai berikut :

- a. Keterbukaan Informasi Publik bagi semua Badan Publik atau Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas akan mempengaruhi terwujudnya suatu tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel;
- b. Beberapa tolak ukur ketercapaian pelaksanaan kegiatan pada tahun 2025 yaitu adanya peningkatan pembangunan akses telekomunikasi untuk memberikan sinyal kepada daerah-daerah yang masih blankspot di Kabupaten Kepulauan Anambas, sehingga untuk melakukan komunikasi seluler masyarakat tidak harus jauh-jauh lagi mencari sinyal;
- c. Selain akses telekomunikasi, pelayanan akses internet Perangkat Daerah baik itu Dinas, Kecamatan, Desa, Sekolah, Puskesmas dan Objek Wisata pada tahun 2025 sudah terpenuhi dan dilakukan maintenance jika terjadi gangguan baik dengan penggantian perangkat secara langsung maupun koordinasi dengan penyelenggara telekomunikasi. Tidak hanya terbatas pada akses telekomunikasi dan akses internet, pelayanan juga dilakukan terhadap penggunaan aplikasi maupun website yang disediakan sehingga untuk melakukan pekerjaan menjadi lebih mudah dan memberikan informasi tentang pelaksanaan kegiatan melalui website yang telah disediakan;
- d. Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan Data Statistik Sektorial dari perangkat Daerah berdasarkan Rencana Strategis (renstra) setiap Perangkat Daerah. Data statistik sektorial tersebut dapat menjadi bahan evaluasi bagi Perangkat Daerah dalam perencanaan pembangunan Daerah. Hal ini karena perangkat Daerah telah memiliki dan menggunakan data yang tertuang dalam renstra perangkat daerah dalam pelaksanaan kegiatan perangkat daerah, sehingga perangkat daerah bisa menggunakan data yang dipublikasikan oleh diskominfo dalam melaksanakan evaluasi capaian kegiatan yang dilaksanakan. Selain itu, tersusunnya metadata

variabel kegiatan statistik sektoral memberikan kemudahan dalam menjelaskan informasi tentang konsep dan definisi dari data-data sektoral yang dikumpulkan oleh walidata dari produsen data sektoral, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman dalam menafsirkan data. Selain itu untuk mendukung Kebijakan Satu data Indonesia dalam menghasilkan data yang akurat, Mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan; dan

- e. Capaian kinerja pelayanan pada urusan persandian ditandai dengan tercapainya indikator pemenuhan nilai indeks KAMI sesuai dengan target kinerja Kepala Dinas. Salah satu pendukung dalam pemenuhan Indeks KAMI yaitu terselenggaranya penggunaan Tanda Tangan Elektronik (TTE) di lingkungan Pemerintah Daerah berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah dengan capaian 24 OPD yang telah didaftarkan sertifikat elektroniknya. Manfaat dari penggunaan Tanda Tangan Elektronik (TTE) diantaranya yaitu dapat menghemat penggunaan kertas, memberikan kemudahan bagi pengguna dalam melakukan penandatanganan dokumen dimanapun berada, serta dapat menjamin keorisinalan tanda tangan. Karena dengan menggunakan tanda tangan elektronik, seseorang tidak bisa lagi meniru tanda tangan dan identitas diri pengguna dijaga kerahasiannya.

2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik

Untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran, dapat dilakukan dengan beberapa cara. Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas memandang bahwa cara pencapaian tujuan dan sasaran dapat dilaksanakan melalui pendekatan kebijakan.

Sebagai sebuah rangkaian cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka strategi operasional yang dapat diimplementasikan diwujudkan melalui garis-garis kebijaksanaan, rangkaian program, kegiatan dan sub kegiatan yang berkelanjutan dan berkesinambungan. Setiap strategi operasional tersebut menunjukkan

adanya keterkaitan dan konsekuensi yang jelas sebagai suatu sistem operasional Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas.

Kebijaksanaan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan yang bersifat makro telah dirumuskan berdasarkan pada RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021 – 2026. Sedangkan kebijakan dalam konteks organisasi Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik dirumuskan melalui Renstra Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas yang tidak terlepas dari RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam kinerja dan pelayanan karena dampaknya yang signifikan di masa depan. Suatu kondisi atau kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Isu strategis diperoleh dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pada tahun mendatang. Berdasarkan identifikasi permasalahan serta memperhatikan analisis terkait dengan tantangan dan peluang, faktor pendorong dan penghambat, serta hal-hal yang berkaitan dengan Urusan Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian jangka menengah. Maka dapat ditetapkan isu strategis yang akan dilaksanakan pada tahun 2026 Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas.

2.3.1 Sejauh Mana Tingkat Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dan Hal Kritis Yang Terkait Dengan Pelayanan Perangkat Daerah

1. Tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik semakin tinggi. Hal ini menuntut tersedianya pelayanan publik yang bersifat pasti dalam persyaratan, waktu serta akuntabel

- benar-benar dibutuhkan sehingga perlu diwujudkan dan ditingkatkan secara konsisten;
2. Daya kritis masyarakat bertambah dan akses terhadap media semakin luas dengan berbagai pilihan dan kemudahan. Hal ini dibutuhkan tersedianya media komunikasi yang efektif untuk menyampaikan pesan dan meningkatkan kualitas isi pesan yang diproduksi;
 3. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat belum optimal dan masih harus ditingkatkan dan dikembangkan terutama dalam penguasaan teknologi informasi, profesionalisme dan kepribadian Sumber Daya Manusia;
 4. Salah satu isu strategis yang menjadi tanggungjawab Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik adalah akses telekomunikasi dan pengembangan IT. Untuk memberikan pelayanan secara maksimal kepada masyarakat, Dinas terus melakukan koordinasi dengan pemangku kebijakan di daerah, penyelenggara telekomunikasi dan melakukan pengembangan-pengembangan bidang IT;

2.3.2 Permasalahan dan Hambatan Yang Dihadapi Dalam Menyelenggarakan Tugas Dan Fungsi Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik

Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi, terkhusus pada Kegiatan Pelayanan Informasi Publik, sebagai berikut:

1. Teknis
PPID sebagai pengelola informasi adakalanya mengalami kesulitan dalam menyampaikan informasi sesuai permohonan yang diminta, hal tersebut dikarenakan PPID belum memiliki data informasi sehingga harus berkoordinasi dengan unit kerja terkait untuk memenuhi permohonan informasi tersebut. Kendalanya yaitu ketika informasi yang diminta tidak dapat diterima dalam waktu yang cepat atau tidak

lengkap, hal ini menyebabkan waktu menjawab menjadi lebih lama bahkan melebihi ketentuan.

2. Substansi

Informasi yang diminta adakalanya membutuhkan pengolahan terlebih dahulu yang membutuhkan waktu yang tidak sebentar, sehingga jawaban permohonan informasi publik tidak dapat dijawab sertamerta. Dalam beberapa kasus, permohonan informasi tidak dapat dikabulkan karena merupakan informasi yang dikecualikan sesuai amanat Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Namun saat ini Undang-undang tersebut sebagai landasan kebijakan pengelolaan informasi, dikhawatirkan bila jawaban informasi yang disampaikan tidak sesuai karena menyalahi aturan lain akibat ketidakpahaman petugas informasi.

3. Eksternal

Permohonan informasi tidak dapat langsung diproses, hal tersebut diakibatkan karena kekurangpahaman pemohon informasi dalam mengajukan permohonan tersebut. Akibatnya petugas informasi mengalami kesulitan dalam melakukan pengecekan dan memproses jawaban informasi yang diminta. Ketidaklengkapan data tersebut kadangkalanya mengakibatkan pemohon informasi tidak dapat menerima informasi yang diminta secara lengkap sehingga diharuskan kembali mengajukan permohonan informasi untuk mendapatkan jawaban sesuai yang diharapkan, hal tersebut seharusnya dapat dihindari bila pada permohonan awal telah menyediakan kelengkapan data dan mengajukan permohonan informasi secara jelas dan rinci.

- a. Pola pikir sebagian badan publik yang masih menganggap Keterbukaan Informasi Publik bukan hal yang penting;
- b. Komitmen sebagian badan publik yang masih rendah terhadap kewajiban pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik;
- c. Masih ditemukannya koordinasi internal PPID Badan Publik yang belum optimal;
- d. Keterbukaan Informasi Publik belum menjadi budaya pada sebagian Badan Publik; dan

- e. Masih dibutuhkannya anggaran dalam menjalankan Keterbukaan Informasi Publik untuk peningkatan kapasitas PPID.

Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi, tekhusus pada Kegiatan Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik, sebagai berikut:

1. Penggunaan media sosial pemerintah seringkali masih bersifat satu arah tanpa banyak memperhatikan dialog interaktif dan diskusi;
 2. Fenomena hoaks di media sosial juga dapat menimbulkan beragam masalah, efek dari penyebaran pesan hoaks tersebut dapat diperparah dengan kondisi sebagian besar masyarakat yang cenderung percaya begitu saja dengan berita yang beredar;
 3. Ketersediaan jumlah pegawai yang belum memadai dan kompetensi pegawai yang sebagian besar kurang sesuai dengan bidang kerjanya; dan
 4. Pengembangan pelayanan yang berbasis elektronik secara online belum maksimal oleh perangkat daerah dalam mengelola website maupun media sosial.
-
1. Dalam pelaksanaan penyelenggaraan Urusan Komunikasi dan Informatika tentunya tidaklah mudah, hal ini berkaitan dengan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi bahwa peran Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi hanya terbatas mengusulkan melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk pemerataan jaringan telekomunikasi di daerahnya;
 2. Letak geografis Kabupaten Kepulauan Anambas yang notabenenya adalah kepulauan dan berbukit sehingga untuk pengembangan akses telekomunikasi sangatlah mahal dan mobilitas perangkat yang sangat sulit tergantung dengan kondisi cuaca dan kontur wilayah;
 3. Selain penyelenggaraan telekomunikasi, terdapat beberapa hambatan dalam pengembangan IT. Hal ini dikarenakan SDM IT yang dimiliki

masih terbatas sehingga beberapa pekerjaan harus diprioritaskan untuk dilakukan pengembangan setiap tahunnya;

4. Peran Statistik Sektoral belum optimal dalam Pemetaan, Pengumpulan dan Pengolahan Data Statistik Sektoral Belum Mengacu Kepada Satu Data Indonesia (SDI), Permasalahan tersebut disebabkan oleh :
 - a. Belum diterbitnya Peraturan Bupati terkait penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat Kabupaten;
 - b. Data statistik sektoral yang bersipat dinamis; dan
 - c. Kurangnya Kesadaran Produsen Data Untuk Mencatat dan Melaporkan Data Statistik Sektoral.
5. Diseminasi dan Pemanfaatan Data Statistik Sektoral, Permasalahan tersebut disebabkan oleh :
 - a. Belum Optimalnya Diseminasi Data Statistik Sektoral; dan
 - b. Belum optimal nya pemanfaatan portal statistik sektoral Kabupaten Kepulauan Anambas.
6. Peran Persandian yang belum Optimal Pengamanan Aplikasi Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Belum Optimal dikarenakan tingginya resiko dan kerawanan keamanan informasi berdasarkan hasil assesment, hal tersebut disebabkan oleh :
 - a. Perlu peningkatan kualitas Self Assement keamanan informasi dan persandian dalam rangka peningkatan Cyber Security Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas;
 - b. Perlu peningkatan fasilitas sarana pendukung keamanan informasi di setiap perangkat daerah dalam rangka peningkatan Cyber Security Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas; dan
 - c. Perlu perningkatan kapasitas pengelola keamanan informasi dan persandian dalam rangka peningkatan Cyber Security Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.
7. Keamanan Informasi, Masih lemahnya kepedulian terhadap keamanan terutama terkait dengan data dan informasi. hal tersebut disebabkan oleh Tren perkembangan digital semakin memegang peranan penting dalam proses interaksi antar organisasi maupun individu sehingga

mendorong semakin tingginya resiko kejahatan siber dan harus ada kesiapan dari organisasi.

2.3.3 Dampaknya Terhadap Pencapaian Visi Dan Misi Kepala Daerah, Terhadap Capaian Program Nasional/Internasional, Seperti NSPK, SPM Dan Sdgs (Suistanable Development Goals)

1. Nilai persentase Keterbukaan Informasi Publik yang diperoleh akan berdampak signifikan terhadap pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah ataupun Rencana Strategis Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik . Dengan adanya keterbukaan informasi maka diharapkan proses kontrol masyarakat terhadap pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah dapat dilakukan secara transparan dan akuntabel, sehingga dalam setiap pelaksanaan kegiatan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat;
2. Sejalan dengan tujuan good governance dengan menjalankan praktik-praktik usaha yang sehat serta menjalankan kegiatan pemerintahan yang transparan dan bertanggungjawab untuk memberikan keuntungan yang berarti bagi masyarakat luas. Komunikasi dan koordinasi yang intens antara PPID Utama dengan PPID Pembantu sangat dibutuhkan untuk senantiasa mempublikasikan informasi yang dimiliki di setiap Perangkat Daerah kepada masyarakat melalui berbagai media yang dimiliki;
3. Dampak yang ditimbulkan terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah maupun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik yaitu adanya keterlambatan pengembangan akses telekomunikasi hal ini ditandai dengan adanya perbedaan kualitas sinyal di tiap-tiap daerah, selain itu adanya keterlambatan dalam pengembangan aplikasi yang dikarenakan keterbatasan SDM IT. Akan tetapi permasalahan tersebut tidak menjadi faktor penghambat yang signifikan hal ini dikarenakan pada tahun 2023 capaian kegiatan Urusan Komunikasi dan Informatika sudah mencapai sesuai target.

2.3.4 Tantangan Dan Peluang Dalam Meningkatkan Pelayanan Perangkat Daerah

Tantangan yang dihadapi oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik sebagai berikut :

- a. Globalisasi informasi yang berdampak pada keterbukaan informasi publik, baik dampak positif maupun negatif sehingga perlu dilakukan sosialisasi terkait hal tersebut;
- b. Terbatasnya pemahaman aparaturnya dan masyarakat terhadap kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi sehingga masih terjadi kesenjangan pemahaman informasi di masyarakat;
- c. Belum optimalnya akuntabilitas kinerja aparaturnya Pemerintah Daerah;
- d. Dalam memberikan pelayanan akses telekomunikasi secara maksimal tentunya kualitas sinyal yang ada di Kecamatan diharapkan sama dengan di Kabupaten dan bisa menyamai Perkotaan; dan
- e. Pengembangan aplikasi membutuhkan SDM IT yang handal akan tetapi keterbatasan SDM IT menjadi faktor penghambat dalam pengembangan aplikasi dan harus dilakukan prioritas sesuai kebutuhan.

Adapun peluang yang harus dilakukan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik dalam meningkatkan pelayanan sebagai berikut :

- a. Adanya komitmen besar dari pimpinan dalam pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- b. Tersedianya perundangan yang mendasari regulasi bidang Informasi dan Komunikasi Publik;
- c. Kerjasama dan koordinasi yang terjalin cukup baik antar Perangkat Daerah maupun stakeholders; dan
- d. Terus melakukan koordinasi dan kerjasama dengan penyelenggara telekomunikasi sehingga terus dilakukan peningkatan akses telekomunikasi dan terus melakukan pelatihan dan rekrutmen SDM IT sehingga kuantitas SDM IT menjadi lebih banyak serta diimbangi dengan kualitas yang sangat baik.

2.3.5 Formulasi Isu-isu Penting Berupa Rekomendasi dan Catatan yang Strategis Untuk ditindaklanjuti dalam Perumusan Program dan Kegiatan Prioritas Tahun yang direncanakan

Penerapan open government untuk mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif, dan akuntabel dalam penyusunan kebijakan publik, serta pengawasan terhadap penyelenggara negara dan pemerintahan.

- a. Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada setiap badan publik; peningkatan kesadaran masyarakat tentang keterbukaan informasi publik; publikasi semua proses perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan anggaran ke dalam website PPID;
- b. Penyediaan ruang partisipasi publik dalam menyusun dan mengawasi pelaksanaan kebijakan publik;
- c. Pengembangan sistem publikasi informasi proaktif dan interaktif yang dapat diakses oleh publik;
- d. Dengan letak geografis Kabupaten Kepulauan Anambas yang berbukit, maka pada tahun berikutnya akses telekomunikasi sudah dapat dirasakan oleh semua masyarakat sampai ke Dusun yang ada;
- e. Kualitas sinyal sama antara daerah yang berada di Kecamatan dan Kabupaten serta menyamai Perkotaan;
- f. Adanya prioritas terhadap aplikasi yang sudah dikembangkan untuk terus digunakan baik Dinas sendiri maupun Dinas lain; dan
- g. Adanya peningkatan SDM IT.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Review terhadap Rancangan Awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja, tolok ukur atau target sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program, kegiatan dan sub kegiatan pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas.

Dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dirumuskan Prioritas pembangunan daerah yang pada dasarnya meliputi program-program unggulan dari Perangkat Daerah (PD) yang berkorelasi bagi tercapainya target sasaran pembangunan daerah pada tahun rencana dan dalam rangka untuk mencapai target Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas..

Untuk Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik program prioritas yang tertuang dalam RKPD sesuai dengan prioritas pembangunan daerah tahun 2026 dalam Misi ke 2 (Dua) dan ke 3 (Tiga) adalah sebagai berikut :

Misi ke 2 (Dua) yaitu :

“ Meningkatkan Daya Saing Ekonomi Melalui Pembangunan Infrastruktur yang Merata dan Berkeadilan”

Misi ke 3 (Tiga) yaitu :

” Pelayanan Prima Melalui Reformasi Birokrasi”

Gambaran identifikasi kebutuhan program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas yang tercantum dalam Rancangan Akhir RKPD dibandingkan dengan rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis tahap-tahap sebelumnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :



Tabel 2.4
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026
Kabupaten Kepulauan Anambas

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan RKPD					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Kep. Anambas	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	Rp 5.954.123.063,15	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Kep. Anambas	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	Rp 6.518.162.508	
2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kep. Anambas	Persentase Dokumen Perencanaan, Dokumen Laporan Kinerja Dilaksanakan Tepat Waktu dan Hasil Pengendalian Evaluasi Sesuai Peraturan Perundang-undangan	100%	Rp 41.700.000,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kep. Anambas	Persentase Dokumen Perencanaan, Dokumen Laporan Kinerja Dilaksanakan Tepat Waktu dan Hasil Pengendalian Evaluasi Sesuai Peraturan Perundang-undangan	100%	Rp 42.900.000	
2.16.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	Rp 40.200.000,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	Rp 40.200.000	
2.16.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja	2 Dokumen	Rp 1.500.000,00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kep.	Jumlah Laporan Evaluasi	2 Dokumen	Rp 2.700.000	



			Perangkat Daerah				Anambas	Kinerja Perangkat Daerah			
2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Kep. Anambas	Persentase Tertib Administrasi Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	100%	Rp 5.375.658.775,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Kep. Anambas	Persentase Tertib Administrasi Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	100%	Rp 5.609.231.759	
2.16.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32 Orang	Rp 5.170.993.775,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32 Orang	Rp 5.404.566.759	
2.16.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	Rp 203.040.000,00	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	Rp 203.040.000	
2.16.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Rp 1.625.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Rp 1.625.000	
2.16.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Kep. Anambas	Persentase Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah	100%	Rp 33.564.000,00	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Kep. Anambas	Persentase Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah	100%	Rp 33.564.000	



2.16.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Rp 33.564.000,00	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Rp 33.564.000	
2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Kep. Anambas	Persentase Pengelolaan Kepegawaian Yang Dilaksanakan Tepat Waktu	100%	0	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Kep. Anambas	Persentase Pengelolaan Kepegawaian Yang Dilaksanakan Tepat Waktu	100%	0	
2.16.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	0	
2.16.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	8 Orang		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	0	
2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Kep. Anambas	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Bahan Perkantoran, Kebutuhan Rapat, Aktivitas Lapangan, Pelayanan Tamu, serta Perjalanan Dinas	100%	Rp 265.826.735,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Kep. Anambas	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Bahan Perkantoran, Kebutuhan Rapat, Aktivitas Lapangan, Pelayanan Tamu, serta Perjalanan Dinas	100%	Rp 540.556.980	



2.16.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Rp 5.451.221,50	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Rp 9.934.962
2.16.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Rp 2.513.285,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Rp 4.684.380
2.16.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Rp 7.064.114,00	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Rp 14.752.152
2.16.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Rp 28.338.974,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Rp 51.118.632
2.16.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Rp 20.326.640,50	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Rp 37.768.854
2.16.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	Rp 9.007.500,00	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	Rp 22.020.000
2.16.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Rp 193.125.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Rp 400.278.000



2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Kep. Anambas	Persentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah	100%	Rp 60.223.712,15	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Kep. Anambas	Persentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah	100%	Rp 103.367.847	
2.16.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	Rp -	
2.16.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	9 Unit	Rp 30.000.000,00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	9 Unit	Rp 54.654.000	
2.16.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Rp 25.223.712,15	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Rp 25.223.712	
2.16.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Rp 5.000.000,00	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Rp 23.490.135,24	
2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Kep. Anambas	Persentase Pemenuhan Jasa Administrasi Perkantoran dan Langganan Lainnya	100%	Rp 140.649.841,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Kep. Anambas	Persentase Pemenuhan Jasa Administrasi Perkantoran dan Langganan Lainnya	100%	Rp 140.649.841,00	



2.16.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Rp 62.948.295,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Rp 62.948.295,00	
2.16.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Rp 57.701.546,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Rp 57.701.546,00	
2.16.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Rp 20.000.000,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Rp 20.000.000,00	
2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Kep. Anambas	Persentase Barang Milik Daerah Berkondisi Baik	100%	Rp 36.500.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Kep. Anambas	Persentase Barang Milik Daerah Berkondisi Baik	100%	Rp 67.892.081	
2.16.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	6 Unit	Rp 30.000.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	6 Unit	Rp 57.782.081	



DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK

KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Kep. Anambas	Persentase Peralatan dan Mesin yang Berkondisi Baik	100%	Rp 6.500.000,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Kep. Anambas	Persentase Peralatan dan Mesin yang Berkondisi Baik	100%	Rp 10.110.000	
2.16.02	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Kab. Kep. Anambas	Persentase Keterbukaan Informasi Publik	100%	Rp 2.404.967.548,62	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Kab. Kep. Anambas	Persentase Keterbukaan Informasi Publik	100%	Rp 4.044.836.939	
2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kep. Anambas	Persentase Informasi yang Terpublikasi	100%	Rp 2.404.967.548,62	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kep. Anambas	Persentase Informasi yang Terpublikasi	100%	Rp 4.044.836.939	
2.16.02.2.01.02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	1 Dokumen	Rp 11.405.892,65	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	1 Dokumen	Rp 53.908.081	
2.16.02.2.01.04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	1 Dokumen	Rp 11.405.892,65	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	1 Dokumen	Rp 201.249.000	
2.16.02.2.01.06	Pelayanan Informasi Publik	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	1 Dokumen	Rp 11.405.892,65	Pelayanan Informasi Publik	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	1 Dokumen	Rp 76.384.308	
2.16.02.2.01.07	Layanan Hubungan Media	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Layanan Hubungan Media	1 Layanan	Rp 2.359.343.978,00	Layanan Hubungan Media	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Layanan Hubungan Media	1 Layanan	Rp 3.647.299.627,20	



2.16.02.2.01.10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya	3 Orang	Rp 11.405.892,65	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya	3 Orang	Rp 65.995.922,44	
2.16.03	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Kab. Kep. Anambas	Persentase Layanan SPBE Pemerintah Daerah Yang diterapkan Oleh Perangkat Daerah	85,71 %	Rp 2.974.873.699,96	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Kab. Kep. Anambas	Persentase Layanan SPBE Pemerintah Daerah Yang diterapkan Oleh Perangkat Daerah	85,71%	Rp 4.070.010.837	
2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kep. Anambas	Persentase Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah Kab. Kep. Anambas	100%		Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kep. Anambas	Persentase Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah Kab. Kep. Anambas	100%		
2.16.03.2.01.02	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Rp 11.405.892,65	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Rp 129.028.367,77	



DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK

KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

2.16.03.2.01.03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	30 Unit	Rp 2.881.099.181,49	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	30 Unit	Rp 3.773.670.516,92	
2.16.03.2.02	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kep. Anambas	Persentase Sistem Informasi/ Aplikasi Perkantoran Elektronik yang tersedia disetiap Perangkat Daerah	100%		Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kep. Anambas	Persentase Sistem Informasi/ Aplikasi Perkantoran Elektronik yang tersedia disetiap Perangkat Daerah	100%		
2.16.03.2.02.02	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	1 Dokumen	Rp 11.405.892,65	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	1 Dokumen	Rp 46.095.152,66	
2.16.03.2.02.03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	1 Unit	Rp 11.405.892,65	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	1 Unit	Rp 42.482.000	
2.16.03.2.02.07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	1 Unit	Rp 59.556.840,51	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	1 Unit	Rp 78.734.800	
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Kab. Kep. Anambas	Persentase Laju Pemanfaatan Data Sektoral	100%	Rp 34.217.677,96	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Kab. Kep. Anambas	Persentase Laju Pemanfaatan Data Sektoral	100%	Rp 188.132.000	



2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kep. Anambas	Persentase Dokumen Ketersediaan Data Sektoral Untuk Perencanaan Pembangunan Daerah	45,45 %	Rp 34.217.677,96	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kep. Anambas	Persentase Dokumen Ketersediaan Data Sektoral Untuk Perencanaan Pembangunan Daerah	45,45%	Rp 188.132.000	
2.20.02.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	1 Dokumen	Rp 11.405.892,65	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	1 Dokumen	Rp 54.905.000	
2.20.02.2.01.02	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Rangka Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Kab. Kep. Anambas	Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	1 Orang	Rp 11.405.892,65	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Rangka Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Kab. Kep. Anambas	Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	1 Orang	Rp 57.495.000	
2.20.02.2.01.03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	1 Dokumen	Rp 11.405.892,65	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	1 Dokumen	Rp 75.732.000	
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Kab. Kep. Anambas	Persentase Pelaksanaan Keamanan Digital Perangkat Daerah	16,13 %	Rp 22.811.785,31	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Kab. Kep. Anambas	Persentase Pelaksanaan Keamanan Digital Perangkat Daerah	16,13%	Rp 196.431.896	



2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kep. Anambas	Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan Pengamanan Dokumen Elektronik	16,13 %	Rp 11.405.892,65	Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kep. Anambas	Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan Pengamanan Dokumen Elektronik	16,13%	Rp 114.340.000	
2.21.02.2.01.03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1 Laporan	Rp 11.405.892,65	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1 Laporan	Rp 114.340.000	
2.21.02.2.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kep. Anambas	Persentase Penggunaan Radio HT dan Radio RIG	50,00 %	Rp 11.405.892,65	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kep. Anambas	Persentase Penggunaan Radio HT dan Radio RIG	50,00%	Rp 82.091.896	
2.21.02.2.02.01	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	1 Perangkat Daerah	Rp 11.405.892,65	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	1 Perangkat Daerah	Rp 82.091.896	
TOTAL PAGU ANGGARAN					Rp 11.390.993.775,00	TOTAL PAGU ANGGARAN					Rp 15.017.574.180

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Melalui kegiatan Musrenbang mulai dari Tingkat Kelurahan, Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Kabupaten, Perangkat Daerah akan menyerap aspirasi dari masyarakat.

Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas menanggapi usulan masyarakat terhadap kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun mendatang dan akan mengakomodir sepanjang sesuai dengan TUPOKSI Dinas. Usulan-usulan dari hasil Musrenbang akan ditelaah lebih lanjut dengan melakukan klarifikasi ke lokasi yang meminta bantuan bila sesuai dengan kriteria yang dimiliki Dinas maka akan ditindaklanjuti.

Berdasarkan Hasil Musrenbang Kecamatan dan Kabupaten Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas tidak menerima adanya usulan yang disampaikan oleh masyarakat. Hal ini dapat dilihat pada table di bawah ini :

Tabel 2.5

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Kabupaten Kepulauan Anambas

Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
NIHIL					

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Sejalan dengan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Pencapaian sasaran tersebut selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nasional tahun 2022 yaitu :

- a. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
- b. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
- c. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing;
- d. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
- e. Memperkuat infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar;
- f. Membangun lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim; serta
- g. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

3.1.1 Telaahan Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Rencana strategis (Renstra) Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2020 - 2024 disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 - 2024, yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan agenda (Nawacita) Presiden dan Wakil Presiden, Joko Widodo dan K.H. Ma'ruf Amin.

Kemenkominfo akan berupaya menjadi Kementerian Komunikasi dan Informatika yang andal, profesional, inovatif, dan berintegritas dalam pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong.”

Sesuai dengan perannya, Kemenkominfo dapat mendukung pelaksanaan 9 (sembilan) Misi Presiden dan Wakil Presiden melalui tugasnya sebagai penyelenggara urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika. Dengan demikian, Kemenkominfo akan melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 1, 2, 3, 5, 8, dan 9 dengan uraian sebagai berikut :

1. Memberikan dukungan teknis dan administrasi serta analisis yang cepat, akurat dan responsif kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam pengambilan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan negara;
2. Memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Presiden dalam menyelenggarakan kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara;
3. Menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien di bidang pengawasan, administrasi umum, informasi dan hubungan kelembagaan; dan
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan prasarana Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Dalam rangka mendukung Visi dan Misi Presiden Republik Indonesia, Kemenkominfo memetakan Arah Pembangunan Nasional ke dalam 3 (tiga) tujuan utama Kemenkominfo sebagai fokus pada pembangunan bidang komunikasi dan informatika sebagai berikut :

1. Meningkatkan penyediaan dan pemerataan infrastruktur TIK berkualitas di seluruh wilayah Indonesia;
2. Mendorong percepatan transformasi digital di 3 (tiga) aspek, bisnis, masyarakat dan pemerintahan, yang ditunjang oleh sumber daya manusia yang memiliki kompetensi digital; dan

3. Memperkuat transparansi informasi publik dan pengelolaan komunikasi publik.

Dalam mewujudkan tujuan di atas, Kemenkominfo menetapkan sasaran strategis pembangunan bidang komunikasi dan informatika untuk tahun 2020 – 2024 sebagai berikut :

1. Meningkatnya cakupan jaringan pita lebar yang cepat dan terjangkau;
2. Meningkatnya cakupan wilayah yang terlayani penyiaran digital;
3. Meningkatnya konektivitas layanan pos;
4. Terwujudnya konektivitas Next Generation Broadband Nasional;
5. Meningkatnya pemanfaatan spektrum frekuensi radio dan kualitas pengelolaan layanan publik bidang pos, telekomunikasi dan informatika;
6. Meningkatnya pemanfaatan TIK di sektor ekonomi dan bisnis;
7. Terwujudnya masyarakat yang cerdas digital;
8. Dukungan implementasi digitalisasi pemerintah;
9. Meningkatnya kualitas pengelolaan informasi dan komunikasi publik; dan
10. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.

Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2020 - 2024 adalah pedoman untuk arah pembangunan di bidang komunikasi dan informatika. Pembangunan bidang komunikasi dan informatika lima tahun Rencana Strategis Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021 – 2026 ke depan diprioritaskan pada upaya mendukung pemerataan jaringan telekomunikasi, pembangunan infrastruktur, percepatan pembangunan daerah perbatasan, dan peningkatan sektor pariwisata dan industri, berlandaskan keunggulan sumber daya manusia dan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

3.1.2 Badan Pusat Statistik

Arah kebijakan pembangunan nasional (RPJMN 2020 – 2024) yang terkait dengan pembangunan statistik, merupakan dasar pertimbangan

Badan Pusat Statistik (BPS) dalam menetapkan kerangka pikir dan arah kebijakan pembangunan statistik tahun 2020 – 2024. Arah kebijakan penyediaan data dan informasi statistik yang berkualitas pada tahun 2020-2024 mencakup :

1. Peningkatan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi kegiatan statistik yang diselenggarakan pemerintah pusat, pemerintah daerah dan swasta;
2. Peningkatan hubungan dengan responden dan pengguna data;
3. Peningkatan jumlah dan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM);
4. Peningkatan sarana dan prasarana, termasuk yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan statistik;
5. Peningkatan penggunaan standar dan metodologi statistik internasional di Indonesia; dan
6. Peningkatan ketersediaan statistik dengan menerapkan standar penjaminan kualitas.

Arah kebijakan dan strategi untuk mencapai 6 arah kebijakan penyediaan data dan informasi statistik yang berkualitas sebagaimana tertuang dalam RPJMN tersebut, dikelompokkan menjadi 3 bidang utama prioritas Badan Pusat Statistik (BPS), yaitu:

1. Arah Kebijakan dan Strategi Kualitas Data Sebagai Dasar Pembangunan;
2. Arah Kebijakan dan Strategi Bidang Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia (SDM) di Badan Pusat Statistik (BPS); dan
3. Arah Kebijakan dan Strategi Bidang Sistem dan Infrastruktur di Badan Pusat Statistik (BPS).

Peningkatan kebutuhan pengguna terhadap peningkatan kualitas data dan informasi statistik semakin meningkat. Pengguna data menginginkan data agar dapat tersedia lebih cepat, dan dapat diperoleh lebih mudah, lebih berkualitas dan lebih murah. Oleh karena itu dibutuhkan strategi komunikasi untuk dapat menampung kebutuhan pengguna data yang semakin beragam, saat ini belum terbentuk suatu strategi komunikasi yang koheren kepada

pengguna data untuk mendiseminasikan data statistik yang lebih berkualitas.

Keengganan responden untuk berpartisipasi secara mendalam pada sensus/survei yang dilakukan BPS merupakan suatu permasalahan yang perlu penanganan yang bersifat holistik, mengingat kegiatan statistik yang dilakukan BPS adalah statistik yang bersifat pengakuan dan bukan pengukuran. Keakuratan pengakuan dari sumber data menjadi hal yang sangat penting untuk menjamin kualitas data statistik.

Peningkatan kebutuhan daya yang diperlukan Kementerian dan Lembaga berdampak pada meningkatnya jumlah aktifitas survei sektoral dan ad hoc yang diselenggarakan. Dengan meningkatnya jumlah kegiatan statistik sektoral dan kegiatan survei yang bersifat ad hoc dimana seringkali terdapat beberapa kegiatan yang pelaksanaannya berlangsung pada saat yang sama tidak sebanding dengan ketersediaan SDM statistik yang profesional.

Tuntutan masyarakat terhadap ketersediaan data dan informasi statistik yang beragam dan berkualitas semakin hari semakin meningkat, upaya pengembangan yang dilakukan sampai saat ini telah menghasilkan beragam data dan indikator-indikator sosial-ekonomi. Meskipun demikian data yang dihasilkan tidak jarang mendapatkan kritik dinilai tidak mencerminkan realitas di lapangan. Pro dan kontra mengenai data yang dihasilkan mengindikasikan bahwa kualitas data yang tersedia masih perlu ditingkatkan.

Keinginan masyarakat terhadap data berkualitas mengisyaratkan bahwa pemerintah harus mampu menyajikan data dan informasi statistik yang dapat dipercaya, relevan dan tepat waktu melalui proses kerja yang sistematis tanpa ada distorsi, melalui penataan organisasi serta tata laksana penyediaan data dan informasi, dan didukung Sumber Daya Manusia (SDM) yang profesional, serta Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang modern. Untuk meningkatkan tata laksana penyediaan data dan informasi, dibutuhkan upaya yang luar biasa agar dapat mencapai kinerja yang optimal. Peningkatan tersebut bukan berarti bahwa pembangunan statistik hanya difokuskan pada peningkatan teknik statistik semata, namun perbaikan

proses manajemen untuk menghasilkan data tersebut juga harus menjadi perhatian.

3.1.3 Lembaga Sandi Negara/Badan Siber dan Sandi Nasional

Melalui pelaksanaan arah Organisasi Badan Siber dan Sandi Nasional (BSSN, diharapkan akan membangkitkan dan mendorong seluruh entitas untuk bersinergi dalam mewujudkan tujuan sebagai institusi pemerintah yang memiliki daya kreativitas penuh inovatif, berpegang teguh pada prinsip efektivitas, efisiensi, dan akuntabel serta diimbangi dengan nilai moral dan budaya kerja yang tinggi.

VISI BSSN

Visi pembangunan nasional tahun 2005-2025 dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) yaitu “Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil, dan Makmur”. RPJMN Tahun 2020–2024 merupakan tahapan terakhir dari RPJPN Tahun 2005-2025, yang akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan nasional. RPJMN Tahun 2020-2024 merupakan penjabaran dari visi dan misi Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin. Visi Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2020–2024 yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian dengan Landasan Gotong Royong”. Upaya untuk mewujudkan visi tersebut ditempuh dengan 9 (sembilan) misi atau dikenal sebagai nawacita kedua yaitu :

1. peningkatan kualitas manusia indonesia.
2. struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.
3. pembangunan yang merata dan berkeadilan.
4. mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
5. kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
6. penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
7. perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.
8. pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya.
9. sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

Visi Misi Presiden dan Wakil Presiden di atas selanjutnya dijabarkan ke dalam janji Presiden, dimana dalam bidang pertahanan dan keamanan, BSSN mengampu janji penguatan dan pengembangan sumber daya manusia terutama dalam penguasaan teknologi keamanan siber yang sangat diperlukan dalam pertahanan negara dan mengembangkan sistem keamanan siber dalam kerangka menunjang sistem pertahanan nasional secara keseluruhan. Guna mempertajam visi pembangunan nasional di bidang keamanan siber dan persandian serta untuk menjawab berbagai tantangan dengan memperhatikan lingkungan strategis, maka BSSN menetapkan arah organisasi berupa visi, misi, tujuan, dan sasaran sebagai suatu institusi yang menjamin kedaulatan siber di Indonesia.

Visi BSSN Tahun 2020–2024 dengan mengacu pada visi Presiden dan Wakil Presiden sebagai berikut: “Badan Siber dan Sandi Negara yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi Misi Presiden dan Wakil Presiden: Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”.

Visi BSSN digunakan sebagai arahan kepada semua jajaran di BSSN dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang diemban sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang telah ada. Melalui pelaksanaan arah organisasi BSSN, diharapkan akan membangkitkan dan mendorong seluruh entitas untuk bersinergi dalam mewujudkan tujuan sebagai institusi pemerintah yang memiliki daya kreativitas penuh inovatif, berpegang teguh pada prinsip efektivitas, efisiensi, dan akuntabel serta diimbangi dengan nilai moral dan budaya kerja yang tinggi.

MISI BSSN

Misi BSSN Tahun 2020–2024 disusun dalam rangka memperjelas aspek-aspek penting yang perlu difokuskan dalam pencapaian visi BSSN. Misi BSSN Tahun 2020–2024 sebagai berikut:

1. memberikan dukungan teknis dan administrasi serta analisis yang cepat, akurat, dan responsif kepada pemerintah, sebagai bahan pengambilan

kebijakan penyelenggaraan pemerintahan negara dalam rangka mewujudkan kedaulatan siber Indonesia berkelas dunia. Misi nomor 1 (satu) di atas memiliki makna bahwa BSSN memberikan dukungan kepada pemerintah untuk mewujudkan kedaulatan siber Indonesia berkelas dunia dalam upaya memajukan dan menyejahterakan bangsa melalui komponen teknologi, ekonomi, politik dan budaya di Indonesia.

2. menyelenggarakan keamanan siber dan persandian secara efektif dan efisien.

Misi nomor 2 (dua) memiliki makna bahwa BSSN menyelenggarakan keamanan siber secara efektif dan efisien dengan cara, menyusun dan menerapkan kebijakan keamanan siber dan persandian nasional yang berkualitas, membangun sistem dan operasional keamanan siber dengan menggunakan standar-standar terkini yang meliputi identifikasi, deteksi, proteksi, mitigasi, manajemen krisis, penanggulangan, dan pemulihan terhadap ancaman, insiden, dan/atau serangan siber dan sandi melalui koordinasi dan kolaborasi dengan pemangku kepentingan dan menjalin kerjasama internasional, berperan aktif dalam meningkatkan kompetensi sumber daya manusia nasional di bidang keamanan siber dan sandi serta kompetensi pendukung yang diakui secara global, membangun kondisi yang aman di ruang siber, menjamin perangkat teknologi yang aman, membangun kesadaran pengguna terhadap keamanan siber serta mendorong pemanfaatan teknologi secara aman dan tidak melawan hukum untuk mewujudkan ekosistem siber yang aman dan nyaman.

3. meningkatkan kualitas sumber daya BSSN.

Misi nomor 3 (tiga) memiliki makna bahwa penyelenggaraan keamanan siber dan persandian nasional perlu didukung sumber daya yang berkualitas dengan cara, melakukan inovasi secara terus menerus untuk meningkatkan pertumbuhan birokrasi organisasi, dan mendorong serta mengembangkan teknologi secara mandiri untuk mendukung pengembangan industri dalam negeri di bidang teknologi keamanan siber dan sandi, menyediakan sumber

daya manusia, proses bisnis, sarana dan prasarana secara profesional dan akuntabel.

TUJUAN BSSN

Dalam rangka mencapai visi dan misi, BSSN berupaya memetakan visi dan misi tersebut dalam tujuan yang selanjutnya menjadi dasar dalam penetapan strategi BSSN pada periode tahun 2020–2024. Tujuan BSSN tahun 2020–2024 sebagai berikut:

1. terwujudnya kedaulatan keamanan siber Indonesia. Keamanan siber saat ini telah menjadi isu prioritas seluruh negara di dunia semenjak TIK dimanfaatkan dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam aspek sosial, ekonomi, hukum, organisasi, kesehatan, pendidikan, budaya, pemerintahan, keamanan, pertahanan, dan lain sebagainya. Langkah konkret yang diperlukan Indonesia saat ini dalam mengantisipasi perkembangan siber di dunia yang sangat cepat yaitu melalui kolaborasi antar pemangku kepentingan untuk menyinergikan dua aspek penting ranah siber yaitu ketahanan siber dan keamanan siber. Kedua aspek selanjutnya menjadi dasar dalam mewujudkan kedaulatan siber di Indonesia melalui proses peningkatan pertumbuhan kesadaran dan mengubah perilaku seluruh sektor dan masyarakat dalam meningkatkan ketahanan dan keamanan siber di Indonesia. Pencapaian tujuan “Terwujudnya kedaulatan keamanan siber Indonesia” ditandai dengan disusunnya Peta Jalan 2019-2045 “Mewujudkan Kedaulatan Siber Indonesia Berkelas Dunia”, dimana periode pertama (2019-2025) merupakan fase stabilisasi. Fokus BSSN pada periode pertama peta jalan yaitu menjadi fondasi dan stabilisasi teknologi siber dan sandi nasional melalui strategi penguatan dasardasar agar BSSN berjalan secara stabil sebagai institusi negara di bidang siber. Tujuan Strategis ini memastikan bahwa melalui tugas dan fungsi yang dijalankan BSSN akan mengantarkannya menjadi institusi yang diakui dan menjadi referensi di tingkat internasional. Implementasi ukuran keberhasilan BSSN dalam mewujudkan tujuan strategis pada periode pertama peta jalan sesuai

dokumen RPJMN 2020-2024 yaitu menjadi pemimpin dalam mencapai kegiatan prioritas penguatan ketahanan dan keamanan siber yang ditandai dengan meningkatnya skor GCI dari 0,792 (nol koma tujuh sembilan dua) pada tahun 2020 menjadi 0.838 (nol koma delapan tiga delapan) pada tahun 2024. Pada era di mana implementasi teknologi seperti 5G, massive computing, nano satellite, next gen-fiber optic, dan lainnya yang saat ini sudah begitu masif menimbulkan berbagai ancaman yang berpotensi mengganggu kedaulatan negara. Tentunya hal ini menjadi tantangan bagi BSSN dalam merumuskan rencana aksi yang akan diimplementasikan pada periode Renstra 2020-2024. Lima aspek yang menjadi variabel pada perwujudan rencana aksi periode pertama meliputi teknologi, pengembangan kapasitas sumber daya manusia, organisasi, Kerjasama, dan regulasi.

2. terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik di BSSN. Modal penting dalam keberhasilan suatu organisasi meliputi manusia, informasi, dan organisasi itu sendiri. Melalui Renstra BSSN, telah ditetapkan satu tujuan yang menggambarkan kekuatan organisasi berupa budaya kerja, dimana seluruh komponen fokus pada pencapaian arah dan tujuan strategis yang telah ditetapkan. Implementasi reformasi birokrasi merupakan salah satu langkah aksi BSSN untuk mencapai pemerintahan yang baik dan melakukan pembaharuan serta perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan secara efektif, efisien, dan akuntabel. Upaya pencapaian tujuan “Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik di BSSN” melalui peningkatan kualitas reformasi birokrasi di BSSN telah dimulai sejak tahun 2010 hingga saat ini dan telah diperoleh peningkatan indeks reformasi birokrasi dan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah serta meningkatnya kematangan sistem pengawasan internal pemerintah BSSN. Berdasarkan capaian prestasi tersebut. BSSN melalui nilai reformasi birokrasi, BSSN terus berusaha melakukan perbaikan secara berkesinambungan dengan salah satunya berfokus dalam penyiapan pelaksanaan audit keamanan SPBE dalam mendorong terwujudnya perlindungan aset informasi sehingga akan mengefisiensikan birokrasi tata kelola pemerintahan dan meningkatkan kualitas pelayanan dan kepercayaan

publik pada implementasi SPBE. Implementasi ukuran keberhasilan BSSN dalam mewujudkan tujuan strategis “Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik di BSSN” ditandai dengan meningkatnya indeks reformasi birokrasi BSSN dari 70,01 ((tujuh puluh koma nol satu) pada tahun 2020 menjadi 84,36 (delapan puluh empat koma tiga puluh enam) pada tahun 2024.

SASARAN STRATEGIS BSSN

Dalam rangka mendukung pencapaian 2 (dua) tujuan sebagaimana disebutkan diatas, BSSN telah menetapkan 3 (tiga) sasaran strategis yang merupakan kondisi yang ingin dicapai oleh BSSN dalam kurun waktu 2020-2024. Adapun Sasaran Strategis BSSN Tahun 2020-2024 sebagai berikut:

1. meningkatnya maturitas keamanan siber di Indonesia. Isu keamanan siber menjadi hal penting yang menjadi tanggung jawab seluruh komponen bangsa. Serangan siber di Indonesia dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Berkembangnya teknologi internet menjadi latar belakang dalam peningkatan serangan siber di berbagai sektor kehidupan masyarakat. Dihadapkan dengan kondisi di atas, setiap entitas pada semua sektor di Indonesia, diharapkan mampu mengembangkan kemampuan dalam melakukan identifikasi risiko keamanan siber dan melindungi seluruh aset yang dimiliki dari adanya ancaman/insiden siber sehingga akan terbentuk kematangan entitas dalam hal penanganan insiden siber secara sistematis dan terstruktur. Pada era infrastruktur digital saat ini membuat Indonesia semakin rawan terhadap serangan siber. Transformasi digital yang makin pesat berpotensi meningkatkan serangan siber di Indonesia. Pengembangan sistem keamanan digital dapat dimulai dari memperbarui teknologi keamanan siber untuk mengakomodasi ancaman siber baru pada semua lini kehidupan berbasis digital. Melalui konsep maturitas penanganan insiden siber secara mandiri oleh semua sektor baik pemerintah, IKN, dan ekonomi digital, akan membentuk sebuah ekosistem siber yang terintegrasi, efektif, dan solid di wilayah Indonesia.

2. terwujudnya penyelenggaraan keamanan siber dan sandi yang prima. Dengan merujuk pada penilaian GCI yang telah diakui dan menjadi salah satu rujukan bagi seluruh negara terkait komitmen dan usaha dalam menjaga dan meningkatkan keamanan siber, Indonesia membutuhkan sebuah strategi keamanan siber nasional dengan tujuan untuk membangun dan menerapkan tata kelola keamanan siber yang efektif, membangun kemandirian teknologi keamanan siber, mencegah dan mengelola ancaman, insiden serangan siber, meningkatkan budaya keamanan dalam ruang siber, serta mengoptimalkan sumber daya keamanan siber. Keberhasilan dalam penyusunan dan implementasi strategi keamanan siber nasional tidak terlepas dari koordinasi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan keamanan siber nasional. Melalui peran aktif seluruh komponen bangsa akan mewujudkan tatanan penyelenggaraan keamanan siber dan sandi yang prima di Indonesia.
3. terwujudnya birokrasi BSSN yang bersih, akuntabel, berkinerja tinggi, efektif, efisien dan berorientasi pada pelayanan publik. Pembaharuan tatanan birokrasi di BSSN untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang didukung oleh birokrasi yang bersih, akuntabel, berkinerja tinggi, efektif serta efisien dalam rangka menuju pemerintahan yang dinamis dimulai melalui penerapan budaya birokrasi dalam menerjemahkan permasalahan dan kendala yang ada pada periode sebelumnya menjadi representasi pembelajaran Bersama secara adaptif dalam mewujudkan kedaulatan siber Indonesia berkelas dunia.

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2020-2024, dalam rangka pencapaian tujuan serta sasaran pembangunan nasional, ditetapkan 7 (tujuh) agenda pembangunan RPJMN Tahun 2020-2024 sebagai berikut:

1. memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan.

2. mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.
3. meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.
4. revolusi mental dan pembangunan kebudayaan.
5. memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.
6. membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim.
7. memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan dan transformasi pelayanan publik.

Arah Kebijakan dan Strategi RPJMN Tahun 2020-2024 Bidang Keamanan Siber Dalam agenda pembangunan penguatan stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan Tahun 2020-2024 diarahkan pada pemantapan stabilitas keamanan nasional untuk mewujudkan rasa aman dan damai bagi seluruh rakyat, serta keutuhan wilayah negara kesatuan republik Indonesia dan kedaulatan negara dari berbagai ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri. Kondisi tersebut merupakan prasyarat untuk mendukung terlaksananya pembangunan nasional. Arah kebijakan dan strategi nasional untuk mengatasi isu-isu strategis dalam menjaga stabilitas keamanan nasional di ruang siber adalah penguatan keamanan dan ketahanan siber yang diwujudkan dengan strategi berikut:

1. penguatan pengamanan infrastruktur siber.
2. pembangunan dan penguatan computer emergency response team.
3. pencegahan kejahatan siber dan peningkatan kerjasama internasional bidang siber.
4. penguatan kapasitas sumber daya manusia keamanan siber.
5. penyelesaian kejahatan siber clearance rate tindak pidana siber. Arah kebijakan di atas diperkuat dengan adanya proyek prioritas strategis penguatan ketahanan dan keamanan siber. Proyek prioritas strategis ini dimaksudkan sebagai penajaman proyek-proyek prioritas yang dianggap memiliki nilai strategis dan daya ungkit dalam mencapai sasaran prioritas pembangunan nasional di bidang keamanan nasional. Selain itu, dalam

RPJMN Tahun 2020-2024 BSSN juga terlibat dalam manajemen keamanan informasi SPBE.

Proyek Prioritas Strategis RPJMN Tahun 2020-2024 Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan Pada RPJMN Tahun 2020-2024, BSSN menjadi leading sector proyek prioritas strategis bidang politik, hukum, pertahanan dan keamanan yaitu penguatan NSOC-SOC dan Pembentukan 121 (seratus dua puluh satu) CSIRT yang melibatkan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Sesuai RPJMN Tahun 2020-2024, pembentukan proyek prioritas strategis ini dilatarbelakangi oleh isu-isu di bidang keamanan siber sebagai berikut:

1. fenomena digitalisasi pada sektor jasa dan keuangan serta meningkatnya pengguna internet.
2. serangan siber terbanyak sepanjang tahun 2019 berupa percobaan pembocoran data yang disusul dengan serangan trojan.
3. sistem monitoring keamanan siber mata garuda belum mampu mencakup seluruh titik rentan di Indonesia.
4. Indonesia belum memiliki pusat informasi terpadu yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai sumber informasi dan aduan keamanan siber.
5. belum ada mekanisme integrasi dan berbagi data informasi serangan siber antar pemangku kepentingan terkait.

Melalui penguatan NSOC-SOC dan pembentukan 121 (seratus dua puluh satu) CSIRT diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. menurunnya insiden serangan siber.
2. meningkatnya kemampuan bersama multistakeholder keamanan siber dalam melakukan deteksi dini serangan atau ancaman siber.
3. meningkatnya pelayanan multistakeholder keamanan siber melalui pusat informasi terpadu bagi masyarakat.
4. meningkatnya integrasi dan sharing data informasi antar pemangku kepentingan baik pemerintah, swasta, dan komunitas siber lainnya.

Sesuai matriks pembangunan jangka menengah RPJMN Tahun 2020-2024, Kegiatan prioritas nasional penguatan ketahanan dan keamanan siber dijabarkan ke dalam proyek-proyek prioritas nasional, dimana BSSN mengampu 4 (empat) proyek prioritas nasional dengan rincian proyek sebagai berikut:

1. Penguatan pengamanan infrastruktur siber
 - a. perluasan cakupan area national cybersecurity operation center.
 - b. pembangunan kapasitas national computer security incident response team.
 - c. pembangunan sistem monitoring pengendalian informasi.
 - d. penguatan national data center.
 - e. pembangunan infrastruktur voluntary vulnerability disclosure program.
 - f. pembangunan information sharing and analysis center.
2. Pembangunan dan penguatan computer emergency response team
 - a. pembentukan CSIRT pada sektor pemerintah.
 - b. pembentukan tim respon ancaman intelijen siber.
3. Pencegahan kejahatan siber dan peningkatan kerjasama internasional bidang siber, kerjasama regional, bilateral dan multilateral bidang keamanan siber.
4. penguatan kapasitas sumber daya manusia keamanan siber
 - a. peningkatan kompetensi sumber daya manusia pengelola keamanan SPBE pada K/L/D.
 - b. pengembangan sumber daya manusia di bidang keamanan siber.
 - c. penyelenggaraan program born to defence untuk sumber daya manusia pengelola keamanan siber sektor IKN.
 - d. national cyber exercise drill test jumlah peserta yang mengikuti national cyber exercise drill test.
 - e. peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia bidang digital forensic.

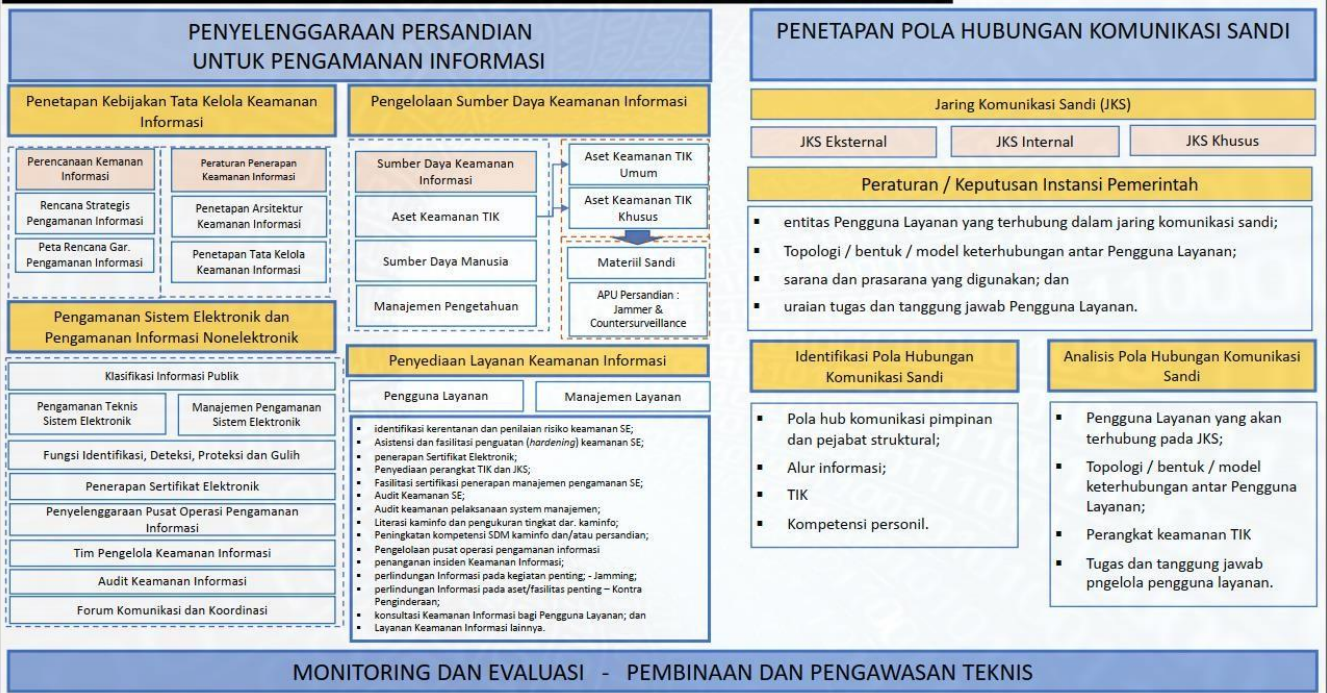
Proyek prioritas strategis dan indikasi pendanaannya dapat dimutakhirkan

melalui RKP dengan mempertimbangkan kesiapan pelaksanaan, pemutakhiran besaran dan sumber pendanaan serta direktif Presiden. Hal ini bertujuan agar proyek prioritas strategis dapat terlaksana secara lebih efektif dan efisien sesuai dengan perkembangan pembangunan.

Dengan ditetapkannya BSSN sebagai *leading sector* proyek prioritas strategis di atas, BSSN dituntut untuk dapat menjalin kolaborasi dengan semua pemangku kepentingan dalam membangun sistem dan tata kelola pelaksanaan penguatan keamanan siber yang terintegrasi. Fungsi BSSN yaitu menjadi pusat yang mengoordinasikan dan memberdayakan seluruh instansi yang berhubungan dengan ranah siber agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan di Indonesia. Pembangunan infrastruktur dan sistem keamanan siber dan sandi nasional merupakan salah satu bentuk inisiatif BSSN dalam membagi kewenangan antar instansi dan untuk mewujudkan tujuan dengan langkah nyata berupa membangun platform *information sharing and analysis center* pada sektor pemerintah, IIKN, dan ekonomi digital. Tujuan pembangunan tersebut untuk menyediakan platform koordinasi terhadap ancaman dan serangan terkini yang terjadi pada ruang siber. *Information sharing and analysis center* berperan untuk membangun dan meningkatkan *shared situational awareness* terhadap kerawanan, kejadian, insiden, dan ancaman yang terjadi dan menjadi media kolaborasi menuju ketahanan siber nasional di Indonesia.

Selain Kementerian/Lembaga terkait, keterlibatan daerah juga perlu didorong dalam upaya mewujudkan keamanan siber nasional. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menjadikan persandian sebagai urusan pemerintahan konkuren yang bertujuan menyelenggarakan pengamanan informasi dan mewujudkan tata kelola secara terpadu dalam proses manajemen SPBE yang efektif, efisien, berkesinambungan, dan berkualitas. BSSN telah menyusun peraturan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang persandian di daerah melalui Peraturan BSSN Nomor 10 Tahun 2019. Peraturan dimaksud memuat norma, standar, prosedur, dan kriteria pelaksanaan urusan persandian yang secara ringkas diilustrasikan dalam Gambar.

PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI



Gambar Persandian untuk Pengamanan Informasi Pada Pemerintah Daerah

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik

Rancangan Tema Pembangunan, Prioritas Pembangunan pada RKPD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2026, sebagai berikut :

Rancangan Tema Pembangunan :

“Peningkatan Kualitas Pelayanan Dasar dan Daya Saing Daerah melalui Pengembangan Pariwisata dan Perikanan yang Berbasis pada Potensi Lokal serta Pengembangan Sumber Daya Manusia yang Inovatif”

Rancangan Prioritas Pembangunan :

1. Meningkatkan Kualitas Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan.
2. Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Kesetaraan Gender serta Melakukan Pengembangan Infrastruktur yang Merata.
3. Meningkatkan Ketahanan Pangan dan Ekonomi Biru.
4. Mempersiapkan Tenaga Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan dan Mengembangkan Ekonomi Kreatif.
5. Memperkuat Reformasi Birokrasi.

Tujuan dan sasaran Rencana Kerja Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2021 – 2026 sebagai perumusan fokus program, kegiatan dan sub kegiatan strategis yang menunjukkan tingkat prioritas dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah, yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja setiap tahunnya mengacu kepada Tujuan dan Sasaran yang tertuang di dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021 - 2026.

Adapun tujuannya dimaksud sebagai berikut :

1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih di Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kab. Kep. Anambas;
2. Meningkatkan Titik Lokasi / Desa Terlayani Telepon Seluler dan atau Internet yang Memadai; dan
3. Meningkatkan Penggunaan Sistem Informasi Daerah.

Sedangkan sasaran Rencana Kerja (Renja) juga mengacu kepada sasaran yang tertuang di dalam Dokumen Rencana Strategis Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2021 – 2026 sebagai berikut :

1. Meningkatnya Tata Kelola Kinerja Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kab. Kep. Anambas yang Transparan dan Akuntabel;
2. Meningkatnya Perluasan Layanan Telekomunikasi;
3. Meningkatnya Penggunaan Sistem Informasi Daerah;
4. Meningkatnya Pelayanan Data dan Statistik; dan
5. Meningkatnya Kinerja Sistem Persandian Daerah.

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran
Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik
Tahun Anggaran 2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun 2026
1	2	3	4	5
1	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih di Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kab. Kep. Anambas		Nilai Indeks Reformasi Birokrasi	(67.00) B
		Meningkatnya Tata Kelola Kinerja Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kab. Kep. Anambas yang Transparan dan Akuntabel	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kab. Kep. Anambas	(65.00) B
2	Meningkatkan Titik Lokasi / Desa Terlayani Telepon Seluler dan atau Internet yang Memadai		Persentase Desa yang Terjangkau Akses Jaringan Telekomunikasi	-
		Meningkatnya Perluasan Layanan Telekomunikasi	Persentase Desa Yang Masih Blank Spot terselesaikan	-
3	Meningkatkan Penggunaan Sistem Informasi Daerah		Nilai Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	(2,63) B
		Meningkatnya Penggunaan Sistem Informasi Daerah	Persentase Pemenuhan Aspek SPBE	87,50%
			Nilai Keterbukaan Informasi Publik	(88.00) Menuju Informatif
		Meningkatnya Pelayanan Data dan Statistik	Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang Memenuhi Standard Data Indonesia (SDI)	71,43%
		Meningkatnya Kinerja Sistem Persandian Daerah	Nilai Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	(320) Cukup Baik

Sumber : Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Tahun 2021 – 2026

3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Rencana Kerja (Renja) merupakan proses penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis (Renstra) yang disusun. Dalam proses rencana kerja, Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas mendefinisikan seluruh Sasaran Strategis, Kebijakan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan diimplementasikan dalam satu tahun kegiatan dan dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja.

Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas pada Tahun 2026 melaksanakan 5 (lima) Program, 13 (Tiga belas) Kegiatan dan 38 (tiga puluh delapan) Sub Kegiatan sebagaimana berikut ini :

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 - b. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 - b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD;
 - c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.
3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - a. Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD.
4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - a. Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya;
 - b. Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.

5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - c. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
 - d. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - e. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - f. Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu;
 - g. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a. Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
 - b. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
 - c. Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - c. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
 - b. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

B. Program Informasi dan Komunikasi Publik

1. Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Sub Kegiatan Monitoring Opini dan Aspirasi Publik;
 - b. Sub Kegiatan Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik;
 - c. Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik;
 - d. Sub Kegiatan Layanan Hubungan Media.

C. Program Aplikasi Informatika

1. Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Sub Kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 - b. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah.
2. Kegiatan Pengelolaan e-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Sub Kegiatan Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 - b. Sub Kegiatan Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah;
 - c. Sub Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 - d. Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas.

D. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

1. Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

- a. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral;
- b. Sub Kegiatan Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi;
- c. Sub Kegiatan Membangun Metadata Statistik Sektoral.

E. Program Penyelenggaraan ★ Persandian Untuk Pengamanan Informasi

1. Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik.
2. Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Sub Kegiatan Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Pada dokumen rencana kerja dijabarkan dan ditetapkan target kinerja tahunan. Target kinerja ini akan menjadi komitmen bagi Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas untuk mencapainya dalam satu tahun, dan merupakan tolok ukur (benchmarks) bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan. Sebagai rumusan rencana program dan kegiatan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2026 dan prakiraan maju Tahun 2027, maka dapat di lihat pada Tabel di bawah ini :

Tabel 3.2

Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2026
dan Perkiraan Maju Tahun 2027
Kabupaten Kepulauan Anambas

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Kep. Anambas	100%	Rp 6.518.162.508	APBD KKA	-	100%	Rp 6.518.162.508





2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Dokumen Laporan Kinerja Dilaksanakan Tepat Waktu dan Hasil Pengendalian Evaluasi Sesuai Peraturan Perundang-undangan	Kab. Kep. Anambas	100%	Rp 42.900.000	APBD KKA	-	100%	Rp 42.900.000
2.16.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Kep. Anambas	4 Dokumen	Rp 40.200.000	APBD KKA	-	4 Dokumen	Rp 40.200.000
2.16.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kep. Anambas	2 Dokumen	Rp 2.700.000	APBD KKA	-	2 Dokumen	Rp 2.700.000
2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Kep. Anambas	100%	Rp 5.609.231.759	APBD KKA	-	100%	Rp 5.609.231.759



2.16.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Kep. Anambas	32 Orang	Rp 5.404.566.759	APBD KKA	-	37 Orang	Rp 5.404.566.759
2.16.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Kep. Anambas	1 Dokumen	Rp 203.040.000	APBD KKA	-	1 Dokumen	Rp 203.040.000
2.16.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Kep. Anambas	1 Laporan	Rp 1.625.000	APBD KKA	-	1 Laporan	Rp 1.625.000
2.16.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah	Kab. Kep. Anambas	100%	Rp 33.564.000	APBD KKA	-	100%	Rp 33.564.000
2.16.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Kep. Anambas	1 Laporan	Rp 33.564.000	APBD KKA	-	1 Laporan	Rp 33.564.000



2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Kepegawaian Yang Dilaksanakan Tepat Waktu	Kab. Kep. Anambas	100%	0	APBD KKA	-	100%	0
2.16.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kab. Kep. Anambas	2 Paket	0	APBD KKA	-	3 Paket	0
2.16.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kab. Kep. Anambas	8 Orang	0	APBD KKA	-	8 Orang	0
2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Bahan Perkantoran, Kebutuhan Rapat, Aktivitas Lapangan, Pelayanan Tamu, serta Perjalanan Dinas	Kab. Kep. Anambas	100%	Rp 540.556.980	APBD KKA	-	100%	Rp 540.556.980
2.16.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneran	Kab. Kep. Anambas	1 Paket	Rp 9.934.962	APBD KKA	-	1 Paket	Rp 9.934.962



	an Bangunan Kantor	gan Bangunan Kantor yang Disediakan							
2.16.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Kep. Anambas	1 Paket	Rp 14.752.152	APBD KKA	-	2 Paket	Rp 14.752.152
2.16.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kab. Kep. Anambas	1 Paket	Rp 51.118.632	APBD KKA	-	3 Paket	Rp 51.118.632
2.16.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Kep. Anambas	1 Paket	Rp 37.768.854	APBD KKA	-	4 Paket	Rp 37.768.854
2.16.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Kep. Anambas	1 Paket	Rp 22.020.000	APBD KKA	-	2 Paket	Rp 22.020.000
2.16.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Kep. Anambas	1 Laporan	Rp 400.278.000	APBD KKA		1 Laporan	Rp 400.278.000
2.16.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Kep. Anambas	1 Laporan	Rp 14.752.152	APBD KKA	-	1 Laporan	Rp 14.752.152



2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah	Kab. Kep. Anambas	100%	Rp 103.367.847	APBD KKA	-	100%	Rp 103.367.847
2.16.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Kab. Kep. Anambas	1 Unit	Rp -	APBD KKA	-	4 Unit	Rp -
2.16.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Kep. Anambas	9 Unit	Rp 54.654.000	APBD KKA	-	4 Unit	Rp 54.654.000
2.16.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Kep. Anambas	1 Unit	Rp 25.223.712	APBD KKA	-	1 Unit	Rp 25.223.712
2.16.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Kep. Anambas	1 Unit	Rp 23.490.135,24	APBD KKA	-	1 Unit	Rp 23.490.135,24



2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Administrasi Perkantoran dan Langganan Lainnya	Kab. Kep. Anambas	100%	Rp 140.649.841	APBD KKA	-	100%	Rp 140.649.841
2.16.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Kep. Anambas	1 Laporan	Rp 62.948.295	APBD KKA	-	1 Laporan	Rp 62.948.295
2.16.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Kep. Anambas	1 Laporan	Rp 57.701.546	APBD KKA	-	1 Laporan	Rp 57.701.546
2.16.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Kep. Anambas	1 Laporan	Rp 20.000.000	APBD KKA	-	1 Laporan	Rp 20.000.000
2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Berkondisi Baik	Kab. Kep. Anambas	100%	Rp 67.892.081	APBD KKA	-	100%	Rp 67.892.081



2.16.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Kep. Anambas	6 Unit	Rp 57.782.081	APBD KKA	-	16 Unit	Rp 57.782.081
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Peralatan dan Mesin yang Berkondisi Baik	Kab.Ke p. Anambas	100%	Rp 10.110.000	APBD KKA	-	100%	Rp 10.110.000
2.16.02	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Keterbukaan Informasi Publik	Kab. Kep. Anambas	100%	Rp 4.044.836.939	APBD KKA	-	100%	Rp 4.044.836.939
2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Informasi yang Terpublikasi	Kab. Kep. Anambas	100%	Rp 4.044.836.939	APBD KKA	-	100%	Rp 4.044.836.939
2.16.02.2.01.02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Kab. Kep. Anambas	1 Dokumen	Rp 53.908.081	APBD KKA		1 Dokumen	Rp 53.908.081



2.16.02.2.01.04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Kab. Kep. Anambas	1 Dokumen	Rp 201.249.000	APBD KKA	-	1 Dokumen	Rp 201.249.000
2.16.02.2.01.06	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	Kab. Kep. Anambas	1 Dokumen	Rp 76.384.308	APBD KKA	-	1 Dokumen	Rp 76.384.308
2.16.02.2.01.07	Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media	Kab. Kep. Anambas	1 Layanan	Rp 3.647.299.627,20	APBD KKA	-	1 Layanan	Rp 3.647.299.627,20
2.16.02.2.01.10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya	Kab. Kep. Anambas	3 Orang	Rp 65.995.922,44	APBD KKA	-	3 Orang	Rp 65.995.922,44
2.16.03	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Layanan SPBE Pemerintah Daerah Yang diterapkan Oleh Perangkat Daerah	Kab. Kep. Anambas	85,71%	Rp 4.070.010.837	APBD KKA	-	92,86%	Rp 4.070.010.837
2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub	Persentase Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah Kab. Kep. Anambas	Kab. Kep. Anambas	100%		APBD KKA	-	100%	



	Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kot a								
2.16.03.2.01 .02	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kep. Anambas	1 Dokumen	Rp 129.028.367,77	APBD KKA	-	1 Dokumen	Rp 129.028.367,77
2.16.03.2.01 .03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Kab. Kep. Anambas	30 Unit	Rp 3.773.670.516,92	APBD KKA	-	30 Unit	Rp 3.773.670.516,92
2.16.03.2.0 2	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Sistem Informasi/ Aplikasi Perkantoran Elektronik yang tersedia disetiap Perangkat Daerah	Kab. Kep. Anambas	100%	67.791.620	APBD KKA	-	100%	Rp 74.570.782



2.16.03.2.02.02	Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Kab. Kep. Anambas	1 Dokumen	Rp 46.095.152,66	APBD KKA	-	1 Dokumen	Rp 46.095.152,66
2.16.03.2.02.03	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	Kab. Kep. Anambas	1 Unit	Rp 42.482.000	APBD KKA	-	1 Unit	Rp 42.482.000
2.16.03.2.02.07	Koordinasi penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	Kab. Kep. Anambas	1 Unit	Rp 78.734.800	APBD KKA	-	1 Unit	Rp 78.734.800
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGA RAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Laju Pemanfaatan Data Sektoral	Kab. Kep. Anambas	100%	Rp 188.132.000	APBD KKA	-	100%	Rp 188.132.000



2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Dokumen Ketersediaan Data Sektoral Untuk Perencanaan Pembangunan Daerah	Kab. Kep. Anambas	45,45%	Rp 188.132.000	APBD KKA	-	63,64%	Rp 188.132.000
2.20.02.2.01.01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Kab. Kep. Anambas	1 Dokumen	Rp 54.905.000	APBD KKA	-	1 Dokumen	Rp 54.905.000
2.20.02.2.01.02	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Kab. Kep. Anambas	1 Orang	Rp 57.495.000	APBD KKA	-	1 Orang	Rp 57.495.000
2.20.02.2.01.03	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	Kab. Kep. Anambas	1 Dokumen	Rp 75.732.000	APBD KKA	-	1 Dokumen	Rp 75.732.000



2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Pelaksanaan Keamanan Digital Perangkat Daerah	Kab. Kep. Anambas	16,13%	Rp 196.431.896	APBD KKA	-	19,35%	Rp 196.431.896
2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan Pengamanan Dokumen Elektronik	Kab. Kep. Anambas	16,13%	Rp 114.340.000	APBD KKA	-	19,35%	Rp 114.340.000
2.21.02.2.01.03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Berbasik Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Kab. Kep. Anambas	1 Laporan	Rp 114.340.000	APBD KKA	-	1 Laporan	Rp 114.340.000
2.21.02.2.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penggunaan Radio HT dan Radio RIG	Kab. Kep. Anambas	50,00%	Rp 82.091.896	APBD KKA	-	53,70%	Rp 82.091.896



2.21.02.2.02 .01	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	Kab. Kep. Anamb as	1 Perangkat Daerah	Rp 82.091.896	APBD KKA	-	1 Perangkat Daerah	Rp 82.091.896
	TOTAL				Rp 15.017.574.180				Rp 15.017.574.180



BAB IV**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN**

Berdasarkan hasil dari keputusan Bersama saat dilaksanakannya Forum Perangkat Daerah terdapat beberapa rencana kerja yang disepakati untuk menjadi fokus dan arah pelayanan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik pada Tahun 2026 yaitu :

URUSAN KOMUNIKASI

- a. Sub Kegiatan Nama Domain : Penyelenggaraan domain yang di Kelola oleh Diskominfotik, dengan melakukan sewa terkait Web Hosting, Web Mail, Lisensi Certifikat, dan IP Publik untuk masyarakat. Rencana akan dilakukan penambahan kapasitas penyimpanan web Hosting;
- b. Sub Kegiatan Jaringan Intra : Jaringan masih tetap melakukan hal yang sama seperti di tahun sebelumnya, dan akan menyediakan rencana pembangunan jaringan Intranet untuk kantor baru Perangkat Daerah di Pasir Peti. Serta mencoba untuk melakukan perluasan/membagi kapasitas bandwidth ke Kecamatan siantan timur khususnya untuk di kantor Camat. Akan coba melakukan sewa fiber optik atau radio untuk di pulau jemaja dan palmatak. Hal ini membutuhkan biaya terkait merdeka sinyal;
- c. Sub Kegiatan SPBE : Melakukan penerapan sesuai amanat PerPres 95 tahun 2018, dan pengembangan dari dokumen arsitektur untuk membuat dokumen manajemen SPBE (Manajemen Resiko/Data);
- d. Sub Kegiatan Pusat Data : Melakukan Pengelolaan server dan rencana untuk melakukan layanan data persuratan dalam hal tersebut mengingat sudah terbangunnya kantor/Gedung NOC Diskominfotik agar dapat dipergunakan dan bisa berjalan dengan maksimal harus melakukan relokasi perangkat dari gedung lama ke gedung baru dan membutuhkan penambahan kebutuhan dasar untuk Gedung guna menunjang pekerjaan;

- e. Sub Kegiatan Aplikasi : Mengembangkan aplikasi khususnya Aplikasi Satu Data Anambas yang di tahun 2024 masih tahap pengembangan dan pemetaan untuk OPD;

URUSAN INFORMATIKA

- a. Monitoring Opini Dan Aspirasi Publik : Untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, dalam mengelola pengaduan masyarakat melalui website Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) yang merupakan bentuk aspirasi masyarakat yang harusnya menjadi motivasi bagi setiap kementerian dan lembaga dalam meningkatkan pelayanan publik. Mengingat Kebutuhan masyarakat akan informasi yang terus berkembang sehingga pelayanan publik yang dilaksanakan juga harus semakin meningkat. Serta melakukan pengendalian dan kontrol akan isu-isu yang muncul dalam rangka keterbukaan informasi;
- b. Sub Kegiatan Konten Dan Perencanaan : Melakukan Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah sehingga semua agenda pemerintah daerah bisa terpublikasi dengan baik dan dikemas dala konten yang akan menciptakan citra positif bagi pemerintah daerah. Guna menunjang hal tersebut maka dibutuhkan penambahan Perangkat Multimedia Produksi dan Pengelolaan Konten Informasi;
- c. Sub Kegiatan Layanan Informasi Publik : Melakukan Forum Koordinasi PPID dalam rangka Penguatan dan Peningkatan Layanan PPID sehingga terlaksananya Keterbukaan Informasi Publik dimana di tahun 2022 masih kegiatan tersebut belum terlaksana dikarenakan pandemi covid -19. Lebih meningkatkan rapat koordinasi kepada seluruh Perangkat Daerah dalam rangka memenuhi apa yang menjadi tanggungjawab dalam melakukan upload data yang menjadi bagian dari keterbukaan informasi dimana dalam hal ini masih kurangnya perhatian untuk memenuhi hal tersebut.

- Meningkatkan pelayanan Informasi Publik di lingkungan Perangkat Daerah untuk menghasilkan layanan Informasi Publik yang berkualitas;
- d. Sub Kegiatan Layanan Hubungan Media : Melakukan Pembinaan Pengelolaan dan Kerjasama antara media dengan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dengan meningkatkan pemberitaan tentang Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dan meningkatkan penyebaran melalui layanan media sosial;
 - e. Penambahan Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik pada Program Informasi dan Komunikasi Publik yang sebelumnya tidak tertuang di dalam Dokumen Rancangan Awal RENJA 2026 yang mana sub kegiatan ini menjadi kebutuhan yang sangat penting guna meningkatkan pengetahuan dan peningkatan terkait mutu dari Sumber Daya Manusia (pegawai) yang membidangi peliputan secara luas dari sisi menciptakan konten-konten yang menarik;
 - f. Penambahan Sub Kegiatan Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka memenuhi ataupun menjadi prioritas bidang ke arah peliputan untuk menyebarluaskan informasi ke masyarakat salah satu nya kami sudah menyediakan ruang studio dan membutuhkan alat-alat guna menunjang ruangan tersebut sehingga informasi bisa diakses secara gratis oleh masyarakat.

URUSAN STATISTIK

- a. Sub Kegiatan Data Statistik Sektoral : Fokus Kegiatan 2023 akan di arahkan sesuai dengan yang menjadi target dari BUPATI kepada Bidang Statistik, rencana bidang statistic akan melakukan pengumpulan terkait data-data pembangunan yang menjadi prioritas terkait indikator kinerja RENSTRA di Setiap OPD (21 OPD). Fokus terkait data hanya sampai mengumpulkan, rencana akan melakukan kajian evaluasi terkait data yg dibutuhkan (urgent).

Di tahun 2022 sedang mencoba untuk melakukan kajian terkait infrastruktur yang di bangun terhadap perekonomian (khususnya di Kec. Siantan).

Melakukan kajian hanya dengan tim statistik sendiri dengan BPS, bisa juga melibatkan OPD terkait dari apa yang akan di lakukan kajian paling tidak minimal 1 atau 2 kajian setiap tahunnya terkait pembangunan;

Penambahan terkait Honorarium untuk petugas kordinator data di setiap OPD;

- b. Sub Kegiatan Peningkatan Sumber Daya Manusia Statistik : Peningkatan SDM untuk 4 orang agar di tambahkan, karena akan melakukan peningkatan ataupun pelatihan ke Kordinator data statistik di setiap OPD Bersama BPS;
- c. Sub Kegiatan Metadata Statistik : Seandainya di tahun 2022 ada melakukan kajian, bisa di tindaklanjuti untuk melakukan Metadata Kegiatan (penjelasan alur/proses awal sampai dengan publikasi). Yang di hasilkan hanya sekedar informasi/gambaran terkait kajian itu sendiri;

URUSAN PERSANDIAN

- a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik : Percepatan penggunaan Tanda Tangan Elektronik guna sebagai pengamanan digital;
- b. Sub Kegiatan Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota : Memprioritaskan pengadaan Alat Penginderaan Jammer sebagaimana alat tersebut menjadi pelaporan baik capaian Kinerja Kepala Dinas yang menjadi sasaran dalam Perjanjian Kinerja dan menjadi Penilaian Laporan Penyelenggaran Pemerintah Daerah (LPPD) setiap tahunnya dalam hal urusan Persandian.



Rumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024, dapat di lihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4.1

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Tahun 2026

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator	Rencana Tahun 2026		
			Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian
1	2	3	4	5	6
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 6.518.162.508	APBD KKA	100%
2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Dokumen Laporan Kinerja Dilaksanakan Tepat Waktu dan Hasil Pengendalian Evaluasi Sesuai Peraturan Perundang-undangan	Rp 42.900.000	APBD KKA	100%
2.16.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 40.200.000	APBD KKA	4 Dokumen
2.16.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 2.700.000	APBD KKA	2 Dokumen
2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	Rp 5.609.231.759	APBD KKA	100%
2.16.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 5.404.566.759	APBD KKA	32 Orang
2.16.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp 203.040.000	APBD KKA	1 Dokumen



2.16.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp 1.625.000	APBD KKA	1 Laporan
2.16.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah	Rp 33.564.000	APBD KKA	100%
2.16.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp 33.564.000	APBD KKA	1 Laporan
2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Kepegawaian Yang Dilaksanakan Tepat Waktu	-	APBD KKA	100%
2.16.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-	APBD KKA	2 Paket
2.16.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-	APBD KKA	8 Orang
2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Bahan Perkantoran, Kebutuhan Rapat, Aktivitas Lapangan, Pelayanan Tamu, serta Perjalanan Dinas	Rp 540.556.980	APBD KKA	100%
2.16.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Rp 9.934.962	APBD KKA	1 Paket
2.16.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Rp 4.684.380	APBD KKA	1 Paket
2.16.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Rp 14.752.152	APBD KKA	1 Paket



2.16.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Rp 51.118.632	APBD KKA	1 Paket
2.16.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Rp 37.768.854	APBD KKA	1 Paket
2.16.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp 22.020.000	APBD KKA	1 Laporan
2.16.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 400.278.000	APBD KKA	1 Laporan
2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah	Rp 103.367.847	APBD KKA	100%
2.16.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Rp -	APBD KKA	1 Unit
2.16.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Rp 54.654.000	APBD KKA	9 Unit
2.16.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Rp 25.223.712	APBD KKA	1 Unit
2.16.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Rp 23.490.135,24	APBD KKA	1 Unit
2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Administrasi Perkantoran dan Lainnya	Rp 140.649.841	APBD KKA	100%
2.16.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp 62.948.295	APBD KKA	1 Laporan
2.16.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Rp 57.701.546	APBD KKA	1 Laporan
2.16.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Rp 20.000.000	APBD KKA	1 Laporan



		Kantor yang Disediakan			
2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Berkondisi Baik	Rp 67.892.081	APBD KKA	100%
2.16.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Rp 57.782.081	APBD KKA	6 Unit
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Peralatan dan Mesin yang Berkondisi Baik	Rp 10.110.000	APBD KKA	100%
2.16.02	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Keterbukaan Informasi Publik	Rp 4.044.836.939	APBD KKA	100%
2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Informasi yang Terpublikasi	Rp 4.044.836.939	APBD KKA	100%
2.16.02.2.01.02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Rp 53.908.081	APBD KKA	1 Dokumen
2.16.02.2.01.04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Rp 201.249.000	APBD KKA	1 Dokumen
2.16.02.2.01.06	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	Rp 76.384.308	APBD KKA	1 Dokumen
2.16.02.2.01.07	Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media	Rp 3.647.299.627,20	APBD KKA	1 Layanan
2.16.02.2.01.10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya	Rp 65.995.922,44	APBD KKA	3 Orang
2.16.03	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Layanan SPBE Pemerintah Daerah Yang diterapkan Oleh Perangkat Daerah	Rp 4.070.010.837	APBD KKA	85,71%



2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah Kab. Kep. Anambas		APBD KKA	100%
2.16.03.2.01.02	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 129.028.368	APBD KKA	1 Dokumen
2.16.03.2.01.03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Rp 3.773.670.516,92	APBD KKA	30 Unit
2.16.03.2.02	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Sistem Informasi/ Aplikasi Perkantoran Elektronik yang tersedia di setiap Perangkat Daerah	125.150.000	APBD KKA	100%
2.16.03.2.02.02	Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Rp 46.095.152,66	APBD KKA	1 Dokumen
2.16.03.2.02.03	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	Rp 42.482.000	APBD KKA	1 Unit
2.16.03.2.02.07	Koordinasi penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	Rp 78.734.800	APBD KKA	1 Unit
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Laju Pemanfaatan Data Sektoral	Rp 188.132.000	APBD KKA	100%
2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Dokumen Ketersediaan Data Sektoral Untuk Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp 188.132.000	APBD KKA	45,45%



2.20.02.2.01.01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Rp 54.905.000	APBD KKA	1 Dokumen
2.20.02.2.01.02	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Rp 57.495.000	APBD KKA	1 Orang
2.20.02.2.01.03	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	Rp 75.732.000	APBD KKA	1 Dokumen
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Pelaksanaan Keamanan Digital Perangkat Daerah	Rp 196.431.896	APBD KKA	16,13%
2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan Pengamanan Dokumen Elektronik	Rp 114.340.000	APBD KKA	16,13%
2.21.02.2.01.03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Rp 114.340.000	APBD KKA	1 Laporan
2.21.02.2.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penggunaan Radio HT dan Radio RIG	Rp 82.091.896	APBD KKA	50,00%
2.21.02.2.02.01	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	Rp 82.091.896	APBD KKA	1 Perangkat Daerah

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2026 merupakan bentuk penjabaran tahunan dari Rencana Strategis Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021 – 2026. Rencana kerja ini disusun untuk menjaga kesinambungan pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam rangka mencapai sasaran strategis beserta target yang ingin dicapai (akhir periode renstra 2021 – 2026).

Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas merupakan dinas yang dalam pelaksanaan tugasnya masih harus sering dievaluasi. Diharapkan dengan evaluasi yang terus berjalan secara sistematis, seluruh jajaran Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik dapat menunjukkan kinerja yang memuaskan dan meyakinkan masyarakat bahwa keberadaan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas merupakan aset yang berharga bagi terlaksananya otonomi daerah.

Dengan telah tersusunnya Rencana Kerja Tahunan ini maka Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas harus segera melakukan peningkatan kualitas pelayanan dalam Urusan Komunikasi dan Informatika, Urusan Statistik dan Urusan Persandian.

Karena Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas merupakan pintu gerbang Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dengan senantiasa menyediakan Informasi yang dibutuhkan masyarakat baik yang berskala lokal, regional dan nasional juga sebagai Dinas yang menjalin Komunikasi timbak balik yang seimbang, aspiratif dan efektif sesuai dengan paradigma baru yang ada.

Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas tidak saja harus mampu menjadi sumber informasi, tetapi juga harus mampu membuat produk - produk teknologi informasi terbaru dan terbarukan dalam upaya memberikan kemudahan pelayanan informasi

kepada masyarakat sehingga diharapkan mampu menjadi garda utama dalam pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021 – 2026.

Untuk dapat meningkatkan kinerja diperlukan adanya dukungan sarana dan prasarana yang memadai, kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur dan ketersediaan anggaran serta adanya komitmen pemangku kepentingan dan personil Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas serta didukung segenap *stakeholders* yang ada.

Selanjutnya kami menyadari bahwa dokumen Rencana Kerja Tahunan yang kami susun ini jauh dari sempurna, maka kami dengan segala kerendahan hati mengharapkan koreksi dan masukan dari berbagai pihak untuk penyempurnaan perencanaan dimasa-masa yang akan datang.

Semoga Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas ini dapat menjadi dokumen perencanaan yang bermanfaat sebagai pedoman kerja Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik dan bisa dilaksanakan dengan baik serta diharapkan dapat memacu kinerja aparatur sehingga tercipta hasil kerja yang optimal dan dapat dipertanggung jawabkan.

Tarempa, 10 Maret 2026

KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS,



JAPRIZAL, S.Kom., M.A
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 19750120 200312 1 008